

RISALAH SEMENTRA
(Belum dikoreksi).

R A P A T 75.

Hari Kamis, 13 Oktober 1955.

(Jam panggilan. 19.30).

Pemandangan umum babak ke-I mengenai
Keterangan Pemerintah tentang program Kabinet
Burhanuddin Harahap (P. 114) (Landjutan).

Ketua Arudji Kartawinata.

Sekretaris: S. Poerwadi.

Jong hadir 155 anggota.

M. Sutardjo, artohad kusumo, B. I. Diah,
Ahmad Nino Hadjarati, K. H. Abdulwahab
Chasbullah, J. D. Massie, Des J. L. W. R. Rhemrev
alias Abdurrahman Abdul Salam M. A. Pellian-
pessy Mr Teuku Mohd II " Mr Soebagio
Reksodipoero, Ardiwinangun S. Narto Moeljo-
dipramoedjo, Mr Djindin Purba Ngeradjai
Meilala, Mr Tjoeng Tin Jan, Abubakar Moha-
mad Sahid, A. Djelam, Mochran bin Hadji Ali
Helmuth Kunum, A. A. Riva, Mr Burh noddin
Mr Tadjuddin Noor, Mr Asso'i Baharamjah
utan Indra, A. M. Tangkuisan, Zaini Baharud-
din A. R. Baswedan, Bebasa Daeng Lalo, Anwar
Harjono, Bachtaoeddin, Maridie Danukusumo,
S. Hadikusumo, Ho ain Poeang Limboro, Huto-
mo Supardan, Mr R. Kastman Singodimedjo,
Kobarsjah Krissubanu, Dr B. entaran Martoatmo-
djo, Maizir Achmaddyn " Utarjo Purwosugito,
Sabilah Rasjad I G. C. R. ka S Rangka Rasun,
Said, Sardjono, Djohan Sjibrutah, Sudjono Djo-
jopra itno I J. Oentoe, R. Sumarto Njonja u-
narjo Mangunpuspito, Tjugo, R. P. Soenarjo
Condokoesnemo Mustafi Kamil Usman, Mr Tan
Po Goan, S. M. Abidin Rajatin asution Ge-
lar Sutan Kumala Pantu, Sunardi Adwirjono,
Mr Jusuf Wibisono, Dr H. Ali Akbar Mohd
ur el Ibrahimy Saleh Umar, Mazon Sop-
hinaan Teuku Jusuf Muda Dalam Peris Par-
dede, D. N. Aidit, Njonja Mo:dikdio, Subadio
Sastrosatomo, Nuroellah Njonja Suwarti, Ir Sa-
kirman, Mr A. M. Tambunan, Maruto itig-
hardjo, Arudji Kartawinata, Rh. Kusnan, K. Wel-
djo, Ahem Erningradja, Mr Mohd Dalijono,
Siauw Giok Tjhan Tony Wen, Mr Hamid Al-
gadrie Gusti A. Moers, I R. Lobo, M. Yunan
Naution, Zainal Abidin Achmad, K. H. Tjilwan
Sarwono S. Sutardjo, Amelz, Sutan aid Ali,
H. Roessli Abdul uhad Basri, Amri Jara, M.
Padang, I mael Lengah Njonja Sunarjati Sukem-
Imam Sutardjo, T. Olu A. S. Bachmid I B. P.
Manuaba A. C. Manappa, Andi Gippa Sonda
D eng Mattajany, jony A. Warah, A. D. An-
dilolo, Mr Teng Tjin Leng, Dr R. Areng Karra-
nahardja Arso Sasroatmodjo, R. T. Surjaning-
prodjo, R. S. Prouoto, Said Bahreisi, R. Saroso
Harsano, I. Langkat Hadji Furd Alwi Isa.



Rapat 75.

R. Kah rukusmen Sosrodanukusumo, R. Bagtodi Mantjanegara, Mohd Mahtud, M. Mohd Zainul Alim, Mohd Ersat Tunodjojo, O. K. Ramli, Mohd Nuh (Sumatera Timur), R. Mohd Soddak, K. H. Ahmad Azhari, Muhamad Hasan, R. Slamet Tirtosubroto, Ibnuadji Prawirosudirdjo, S. Mangunsarkoro, R. M. Hidayat Prawirodiprodjo, A. M. Jusuf Rasidi, Abdul Samad, K. A. Djohar, Dr. Sutan Z. A. Abidin, Ade Mohd Djohan, Tio Klang Soen, E. Kunum Kusumojudo, Dr. D. S. Dja-pari, Hasan Basri, Idham Chahid, Ir. Andi Zainal Abidin, I. A. Moes Rasid Sutan Radja Emas, Mohd Jam Jakin, Ibrahim Sedag, R. Schmitz, W. M. Nieuwenhuis, A. A. Achman, R. Supatno, Musirin Sasrosubroto, Rd. H. Sutarto Hadisudihjo, M. H. Loekman, Achmad Sumadi, Wardi Kusnat, Istra, Emon Bratachwidjaja, R. Abdurrochman Wangsadikarta, Abulhasan, Sidik Kartapati, G. G. Igurah, R. R. Cyrillus Kersa-negara.

Wakil Pemerintah.

1. Harsono Tjokroaminoto Wakil Perdana Menteri. II
2. F. Loh Menteri Perhubungan.
3. Dr. Sumitro Djohadikusumo, Menteri Keuangan.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka.

Djumlah anggota yang hadir adalah 122.

Dari pihak Sekertariat tidak ada sesuatu pengumuman.

Adapun tjara pada malam hari ini jatu melandjutkan pemandangan umum bahak I mengenai Keterangan Pemerintah tentang program Kabinet Burhanuddin Harahap.

Jang akan berbitjara pad malam ini ialah Saudara-saudara: B. M. Diah Sunarjo Gondokusumo, Siauw Giok Tjhan, Mr. A. M. Tambunan, I. A. Moels dan Kobarsjib.

Menurut tjatatan disini semuanya akan memakan waktu 155 menit.

Baikkah saja persilakan sebagai pembittjara pertama Saudara B. M. Diah.

B. M. Diah: Saudara Ketua jang terhormat pada tanggal 12 Agustus 1955 bangsa kita mendapatkan suatu Pemerintah jang membawa etiket "Pemerintah jang terdiri dari orang-orang djudjur dan disegani".

Oleh karena itu maka ja buka salam saja kepada Dewan Perwakilan Rakyat ini dengan salam nasional baru menurut mode sekarang jang haruslah disambut dengan mienah oleh kawan-kawan lain jang tidak diangerahi sifat-sifat jang sudah dimonopoli Kabinet sekar ng lai.....

Djudjur.....!!!

(Siauw Giok Tjhan: lu plagiat.)

Saudara Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, jang terdjudjur dan tersegani diantara seluruh bangsa Indonesia jang delapan



puluh djuta ini telah memperkenalkan kita kepada teamsja yang terdiri dari orang-orang djudjur pula. Memang, Saudara Ketua, diwaktu delapanpuluh djuta djieva dikurangi dengan dua-puluh tiga orang tidak dapat dikatakan orang djudjur dan disegani maka dalam masa Indonesia dilamun kemarau diwaktu-waktu terakhir ini dengan melihat wajah kedupuluh tiga orang itu kita serasa mendapat baju yang djuke yang memberikan kita nafsu makan sedikit.

Saya katakan sedikit. Saudara Ketua karena rakyat sulit djuga untuk menjamin makanannya setiap hari dengan teratur, walaupun berkat kedjurdjuran dan keseganaan yang keluar dari pada pribadi masing-masing Menteri dalam Kabinet Burhanuddin Harahap ini kita menjebakkan harga emas turun, harga uang luar negeri turun, jumlah impor turun, harga getah turun, harga mobil-mobil Mercedes Benz dan Plymouth Plaza, Dodge Kingsway dan Chevrolet Bell Air turun. Hanya walaupun Kabinet ini djudjur dengan Menteri Kewangannya dan Menteri Perekonomiannya yang djuga tidak kalah djudjurnya dari pada seorang anak yang baru lahir, masih belum djuga rakyat hingga itu dapat memakan emas, uang luar negeri, mobil-mobil bagus, karena yang penting djuga baginya ialah: beras, garam, minyak kelapa, ijutan, ijur, ikan asin dan lain-lain yang diperlukannya lebih dari pada turunnya harga mis. mobil dan uang luar negeri.

Saudara Ketua izinkanlah saya sebentar menelaah orang-orang djudjur dari in Kabinet B.H. ini tingkatan dari pada Burhanuddin Harahap (dan bagi laki-laki dewasa ini dilarang sekali mengadakan asosiasi papun diuji dengan potongan nama B.H. ini).

Saya mulai dengan Saudara yang dihardirkan Tuhan subhanahu wata'ala untuk memimpin negara ini dimana seluruh rakyat kekurangan pemimpin-pemimpin djudjur dan disegani. Sekarang dia menggepalin sedumilah ketijl manula Indonesia yang djudjur dan disegani

Selain dari pada kechilatan Saudara Perdana Menteri ini sewaktu ia belum menjadi Menteri Pertama telah menjual mobil pribadinya satu kechilatan yang tidak berarti memang orangnya pantas mendanai diulukan diudjur dan disegani, mengingat bahwa Saudara Perdana Menteri ini tidak perlu banyak bijara dan banyak berfikir. Saudara Mohamad Nair, Ketua Umum Masjumi akan berfikir buat dia...

Dan kemudian saya minta perhatian Saudara Ketua kepada Wakil Perdana Menteri I yang bernama Djani Imadi. Reputasi Saudara Wakil Perdana Menteri I ini memang baik, jika tidak bersalahlah orang yang membikin kerak suara ini dari pada yang dipesan sehingga merupakan negara. Dan agaknya tidaklah pula boleh dikatakan tidak disegani oleh rakyat orang yang selama dimasa djaman Bel tidaktip menindas pergerakan rakyat.





Dan marilah kita perhatikan sahabat baik Ide Anak Agung Gde Agung dari Gianjur, Menteri Luar Negeri dulu Menteri Dalam Negeri didjaman Hatta, dulu lagi Perdana Menteri Negara bagian Indonesia Timur binaan Van Mook dan lebih dulu lagi juga Menteri Dalam Negeri binaan Den Pasar ketika Belanda perlu tenaga ketiga buat meremukkan Republik Indonesia. Anak Agung Gde Agung harangkali orang djudjur dalam maksudnya terat berat sekah memherikan pula dia gelir kehormatan orang jang disegani. Sekah dika diingat bahwa dia adalah Perdana Menteri Negara Indonesia Timur ketika pahlawan bangsa Walter Longinsidi dilawan Belanda (Van Mook) dengan dia tidak mau berhuat apa apa walaupun ada permintaan untuk itu ketika dia berada di Nederland bagaimana dapat dikatakan dia orang jang disegani? Dan tindak-tanduknya dalam politiknya hagai Menteri Dalam Negeri dan kemudian suatu ketetulan pula ketika Andi Aziz berontak dia belum lama berada di Makassar ... sedang Andi Aziz selarang dikurung dan dia bisa menjadi Menteri Luar Negeri meneb hkan saja bertampan. Apakah ini orang jang dikurung djudjur pul?"

Saudara Ketua saja mengerti pula katen, itu memang Belanda gembira sekah ketika dia diangkat menjadi Menteri Luar Negeri karena Papa Drees melihat anak angkatnya bisa memainkan peranan pula. Tentang ini dilain bagian saja kemukakan.

Menteri Perakonomian kita jang djudjur ialah Saudara I. J. Kasimo rupanya tidak disegani dan tidak dipertjaja oleh Sumitro Djojohadikusumo. Rupanya Sumitro menarik pelajaran dari kenyataan bahwa kalau Kasimo tidak bisa terpakai untuk jadi Presiden Jajawa Kopra, bagaimana dia bisa jadi Menteri Perakonomian. Dan karena itu maka hak-hak untuk impor, untuk mengeluarkan devisen huat pemasukan barang dan matjam-matjam hak-hak prerogatif seorang Menteri Perakonomian dalam merealisasi impor diambil alih oleh Sumitro, dan menjadilah Saudara I. J. Kasimo ini hanya seorang Menteri Distribusi dengan praktis tidak bertanggung-djawab lagi pada Dewan Perwakilan Rakyat ini. Oleh karena kenyataan ini maka etiket djudjur dan disegani sebenarnya sumbang buat Kasimo.

Apakah ada etiket ini pada Sumitro Djojohadikusumo? Ketika ada seorang wartawan jang menyatakan bahwa Sumitro telah bersedia menbiat satu transaksi pendjuaan besi tua dari Harta Karun di Morotal, waktu dia menjadi Menteri Keuangan didjaman Kabinet Wilopo maka terasa benar ia bertanggung pada kedjudjurannya. Kata-nja: Integritet saja ditjemarkan. Akan tetapi Sumitro tidak mendapat putusan dari hakim bahwa Integritetnja ditjemarkan dan bahwa dia djudjur dan disegani dan bahwa betul-betul tidak mengizinkan dikeluarkan uang buat beli besi tua di

Morotai karena hakim hanya menghukum wartawan itu dengan hukuman denda karena menghina orang yang bernama Sumitro Hakim rupanja tidak dapat menjatakan, bahwa ada timbangan, ada penjemaran nama dan inisiatifnya, karena bagi hakim ini rupanja tidak dapat dibuktikan.

Dan Sumitro sendiri pernah dihukum denda, karena menghina orang lain sehingga bagaimana orang yang demikian itu bisa disebut disegani?

Kedjudjuran ini perlu pula diselidiki lebih jauh, mengingat bahwa didjaman Sumitro menjadi Menteri Keuangan diizinkan mengimpor beras seharga U.S. \$ 10.000.000 dan kemudian terjual beras itu 50% bakren dan hanjak yang tidak bisa dipakai, mengugat pula bahwa didjamannya kepada Tandiono M. M. (nggala P. I.), tas nama M. Kenchana diizinkan untuk mengeksport karet ke Republik Rakyat Tiongkok dalam hubungan harter dengan tidak mempunyai syarat-syarat untuk berbuat demikian, mengingat pula selah terjual tidak bisa firma ini neta ukia ekspor ini dia mendapat ganti kerugian yang berjumlah tujuh puluh rupiah yang berarti bahwa dengan tidak susah payah firma yang dibela ka an partainya bisa menarik keuntungan gampang saja, maka sudahlah ia menerima bahwa Sumitro ini betul-betul djudjur. Nah, bagaimana pula orang akan mengukut Abdul Hakim sebagai seorang yang disegani, jika dia tidak sgan bertekabahat dengan Ayres dan kontraktor petani-petani Indonesia di Tandjong Morawa, sehingga menyebabkan dijatuhnja Kabinet Wilopo?

Dan bagaimana pikiran Saudara tentang Comala, "orang yang di gati" oleh Tadjuddin Noer dan lumpur yang hitam sebagaimana orang-orang Kalimantan menggali lumpur untuk mencari intan? Karena kita kenal Tadjuddin Noer, ya kenal sekali, bagaimana kita bisa segan dan bagaimana kita bisa yakin Comala Noer itu djudjur?

Dan Saudara Ketua juga kita ulik dan timbang orang yang bernama Menteri Samsuddin Sutan Makmur. Saudara-saudara dari P. I. dan Saudara-saudara dari P. R. N. di mana pula Saudara-saudara dari P. I. R. ini, kenapa em sedikir kalau saja perkenalkan Saudara, juga Makmur ini sebagai seorang yang patut disegani dan dianggap djudjur. Mungkin saudara akan berkata, dia memang djudjur dan dia, sai pado aktinja dan pada tempatja.

Sedjarah seorang yang sudah dikenal hanya panda merombak dan menghaantjorkan, dulu dalam partai-partai yang dimasuknja, sekarang dalam Kabinet ini yang dikvasinja itulah kena batinja kata orang Pendjaringan kalau dikenalkan dia djudjur dan disegani.

Kodokpun akan tertawa mendengarkan etiket demikian untuk Samsuddin Sutan Makmur.

Saudara Ketua, saya hormat dan sajuj kepada setiap makhluk Allah, apakah dia manusia atau



binatang. Dan tidaklah berhak saja menyatakan sesuatu terhadap na ma manusia akan tetapi karena Saudara Perdana Menteri dan Kabinet sekarang telah memperkenalkan kepada kita kawan-kawan saja itu dengan mengemukakan syarat-syarat yang dikehendaki oleh Wakil Presiden dalam pembentukan Kabinet baru menggantikan Kabinet Ali-Arifin yaitu dimana didalamnya duduk orang-orang yang jujur dan disegani". maka adalah hak kita sebagai sesama warganegara menimbang pada kepribadian masing-masing anggota Kabinet ini. Hanya sebagian saja dari rekan Saudara Perdana Menteri saja ambil untuk melukiskan kepribadian beberapa anggota Kabinet Burhanuddin Harahap. Akan tetapi jika diambil seluruhnya dan jika ditimbang dan ditimbang, maka dengan menesai saya berkata sudah ditimbang ternyata sangat keentengannya!

Saudara Ketua yang terhormat sekarang kita membicarakan materi dan pada Keterangan Pemerintah Burhanuddin Harahap ini Poin 1 dari pada programnya berbunyi: Mengembalikan kewibawaan atau gezag moral Pemerintah in casu kepertajaan Angkatan Darat dan masyarakat terhadap Pemerintah

Kita utamakan kewibawaan itu. Dalam bahasa Belanda-nya kewibawaan itu ialah gezag". Dalam inggrisnya authority. Kewibawaan ini berwanjikut-paul dengan pengertian moral dan etika dalam pergaulan hidup dan politik manusia. Bung Karno menyatakan dalam pidato peringatan sepuluh tahun Proklamasi Kemerdekaan kita bahwa gezag dengan tidak ada ontzag" tidak ada artinya. Kabinet Burhanuddin Harahap dalam memperkenalkannya dirinya telah melukiskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Sementara ini bahwa dia adalah pengganti dari pada kekuasaan yang tidak ditimbang faktor faktor moral dan kesuksesan sehingga menimbulkan rasa kegelisahan dan ketakutan yang sungguh-sungguh terasa dalam masyarakat pada umumnya dan kalangan pegawai pada khususnya". Jadi dengan mengemukakan bahwa diwaktu yang terakhir ini ada suatu kekuasaan yang gelap yang uada bermoral dan tidak berkesuksesan maka sekarang datanglah kekuasaan baru yang mempunyai segala sifat-sifat yang dirida oleh Allah subhana wata'ala itu. Maka karena itu haruslah pertaja Saudara saudara kepada kekuasaan ini karena ia sudah mempunyai etiket jujur dan disegani" dan karena itu otomatis bisa dikatakan satu kekuasaan yang dapat mengembalikan kewibawaan atau gezag moral Pemerintah" sebagai di terapkan dalam program pertama dari pada Kabinet ini.

Memang kalau semua orang mau pertaja bahwa demikian keadaannya kita semua merasa sjukur. Kabinet ini sayang tidak dapat meyakinkan saya dan sebagian terbesar masyarakat Indonesia bahwa dia benar-benar disegani dan jujur



walaupun programnya sangat membubung kelangit ketudjuh dan sifatnya ambireus sekuli. Walaupun ia menempatkan dirinya sebagai kekuasaan yang berkewibawaan tetapi ia tidak menerbitkan hormat dan rasa segan, yaitu dalam bahasa asing ontrag. Dengan memindjam kata-kata Presiden kita diwaktu perajaan 10 tahun Proklamasi itu ia adalah sebagai tokoh yang berpakaian djenderal. Saudara Perdana Menteri mengotakan dalam keterangannya mengenai kewibawaan ini bahwa kekuasaan yang lalu itu sebenarnya tidak disukai rakyat dan masyarakat, tidak dihormati dan disegani karena didasarkan kepada suatu mayoritas suara di Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah lama dipandang tidak sesuai lagi dengan kehendak-kehendak yang hidup dalam masyarakat. Perdana Menteri Kabinet Burhanuddin Harahap ini tiada rupa yang insaf bahwa apa yang dikritikannya itu tepat benar bagi diri Kabinetnya sendiri dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah terang-terangan sekarang dipandang tidak sesuai lagi dengan kehendak-kehendak yang hidup dalam masyarakat disebabkan hasil-hasil Pemilihan Umum tanggal 29 September yang lalu menundukkan tegas-tegas bagaimana perbandingan suara sekarang ini seharusnya didalam dan diluar Parlemen.

Pemerintah yang lalu yang terkenal dengan Pemerintah A.A. pada hakikatnya bekerja dengan mayoritas yang sah, karena Parlemen itu dulu belum bisa dihanding seperti direk, apakah benar-benar mentjemunkin masyarakat? Dewan Perwakilan Rakyat yang sekarang ini dulu masih gelap kedudukannya diaman Kabinet Ali, tetapi sekarang udah terang benderang dia berada dimata rakyat sebagai Badan yang tidak lagi mewakilkan hiruk masyarakat politik dan paham yang sesungguhnya didalam negeri ini dan ai dasar yang goyah ekali mlah Kabinet Burhanuddin Harahap ini masih berdiri dan masih ingin berkuasa terus.

Saudara Ketua yang terhormat analisa dari pada Pemerintah Burhanuddin Harahap ini tentang Pemerintah yang lalu untuk meyakinkan hak berkuasa adalah itu analisa yang sangat subjektif, bahkan politik tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Didalam lingkungan sesuatu kekuasaan politik, ada sesuatu demarkasi yang tidak boleh dilawan. Berkas keterangan Pemerintah Burhanuddin Harahap ini dalam mentohai menghinakan Pemerintah yang lalu:

„Dapatlah dimengerti ... bahwa mudah sekali hilangnya kewibawaan Pemerintah terhadap aparaturnya dan terhadap masyarakat yang mengharapkan bantuan dan keadilan dari pada Pemerintahnya.

Kebilangan kewibawaan Pemerintah terhadap aparaturnya njata kita lihat dikalangan Angkatan Darat yang akhirnya diky tau banjaknya turun menyebabkan keruntuhan Kabinet yang lalu”



Keterangan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Burhanuddin Harahap ini telah membenarkan pelanggaran Undang-undang oleh se orang aparatur negara dan ia sudah mempersatukan dirinya pada mereka yang telah menjerang dasar fundamental dari suatu negara hukum. Memang menghukum saja adalah satu pekerjaan yang mudah dilakukan suatu Pemerintah itu mempunyai cukup alat alat yang setu padanya. Akan tetapi, dengan menghukum saja kekuasaan itu menunjukkan bahwa dia tidak percaya akan semangat masyarakat mengabdikan pada Undang-undang negara (law-abidingness) yang sesungguhnya satu-satunya kekuasaan yang permanen bagi Undang-undang dan hukum negara.

Kalau Pemerintah Burhanuddin Harahap tidak dapat mengerti akan hal yang sama maka dapatlah pula saja mengerti bahwa bahwa Kabinet Burhanuddin Harahap ini adalah Machiavelistis yang membenarkan pelanggaran Undang-undang dan hukum yang baik dan menganggap sebagai Undang-undang umum dari pada kesejahteraan, yaitu karena diaan itu diajalah mendominasi kehidupan bagi dirinya sendiri (Selfpreservation kata orang Inggris). Banyak tindakan pidana dilakukan atas nama hukum alam ini. Dan memanglah Kabinet Burhanuddin Harahap ini bisa naik karena kekuatan senjata, seperti pertimbangan Machiavelli dalam menelaah hukum, saja penghapusan dulu Undang-undang itu dari pemerintahan dan saja berbijara tentang senjata.

Untuk membenarkan lagi teorinya yang subjektif itu bahwa kehilangan kewibawaan dari pada Pemerintah yang lalu adalah terlanggarnya norma-norma "sakelijk-technisch", dapatlah lagi kita perhatikan berapa dangkalnya pokok pikiran dari pada Kabinet ini, karena adalah sebaliknya dari pada "sakelijk-technisch" itu yang menyebabkan herbalknya pasang bagi Kabinet Ali-Artin dulu, yaitu kelalaiannya mempergunakan pandangan kebidayaan yang dinamis dan yang boleh menguntungkan bagi masa lama dan kurangnya dia dalam menelaah "psychologische-politisch" aspek dari pada masalah yang disebut Kabinet Burhanuddin Harahap ini, sebagai "sakelijk-technisch".

Saudara Ketua, saya lebih tegas dan hormat pada Kabinet Burhanuddin Harahap yang berorientasi diadur dan objektif dari apakah ia lebih kritis dan objektif dalam hal menelaah "hilangnya" kewibawaan Pemerintah yang lalu. Seorang boleh memisik dan menaruh sesuatu Pemerintah menyimpahi sesuatu Undang-undang, berontak pada baidannya akan suatu hukum akan tetapi menentu kewadiban menghormatinya. Sebab setiap orang diuji, kekuasaan tergantung pada pengabdian pada Undang-undang dan sebagai alat mutlak bagi kehidupan suatu kekuasaan alat kekuasaan haruslah dikuasai oleh Pemerintah yang sah.



Karena jatuhnya Pemerintah yang lalu disebabkan kewibawaannya itu hilang karena aparaturnya tidak menghormatinya lagi, maka ingin kita bertanya: mengapa Kabinet Burhanuddin Harahap ini tidak segera pula setelah ia dilantik mengembalikan kewibawaannya terhadap Angkatan Darat sebagai aparaturnya dengan mengangkat seorang Kepala Staf Angkatan Darat baru. Bukankah disitulah titik penghabisan dari pekerdjaan Kabinet Ali-Arifin dulu?

Dan karena disitulah berkesit "hilangnya kewibawaan" Pemerintah Ali-Arifin dulu maka disini pula harusnya Kabinet Burhanuddin Harahap ini memulai mengembalikan kewibawaannya itu. Tetapi Pemerintah Burhanuddin Harahap ini tidak sanggup berbuat demikian, karena kewibawaannya tidak ada, karena ia dijadikan dihidup atas kasihan aparaturnya yang sedikit atau banyak turut menjebakkan keruntuhan ini. Kita lihat yang lalu!

Apakah kedudukan Pemerintah Burhanuddin Harahap ini sebagai seorang yang kurang vitamin, tetapi dengan gegabah hendak mengatakan dengan menjipak kebawah bahwa dia adalah orang kuat, atau dengan kata-kata a paterensi lebih India yang terkenal dijadikan krisis akhir dari nafsu besar, tenaga kurang.

Dan Kabinet Burhanuddin Harahap ini disatu saat angkuh tetapi di lain saat ia merasa dirinya sebagai orang yang dina dan mengakui bahwa "Pemerintah sadar bahwa wapekerdjaan ini akan meminta waktu, ketidaksanaan dan kesabaran" (halaman 4 Keterangan Pemerintah). Tetapi Pemilihan Umum yang dapat diartikan putusan rakyat sebagai hakim tidak dapat memberikan lagi waktu buat Pemerintah ini, karena dia bukan lagi menjerakan Pemerintah yang mendapat dukungan rakyat terbanyak.

Saudara Ketua yang terhormat, kita harusnya merasa syukur pada Tuhan yang Maha Esa bahwa dengan segala keterangan s. aip kesabaran rakyat Indonesia yang kita pertajai kekuatannya, lahir batin telah menyatakan pendapatnya pada tanggal 29 September yang lalu untuk memilih sendiri wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang akan datang.

Program yang kedua dari Pemerintah Burhanuddin ini ialah melaksanakan Pemilihan Umum menurut rentjana yang sudah ditetapkan, dan melaksanakan terbentuknya Parlemen baru.

Pada waktu Pemerintah Burhanuddin Harahap menyatakan di depan umum dengan tegas beberapa hari sebelum Pemilihan Umum bahwa Pemilihan Umum itu akan dilaksanakan pada tanggal 29 September sesuai dengan rentjana Kabinet yang lalu, maka terasa benar bagi umum dan rakyat bahwa Kabinet ini telah kalah dalam usahanya untuk mengundurkan pemungutan suara itu.

Mengapa saya katakan demikian? Tidak lain dari pada kenyataan bahwa segala daya-upaya dilakukan oleh Menteri-menteri dari partai-partai yang



tidak berarti dari Kabinet Burhanuddin Harahap ini — yang katanya jujur dan disegani — untuk menghalangi m djaja djaram dan yang akan menetapkan waktu mereka dihakimi oleh rakyat. Mereka mengadakan moment opname, stock-opname, stock-opname seakan-akan mereka dapat menghalangi moment-aksi rakyat pada hari yang sudah ditakdirkan itu. Menteri P.S.I. Sumitro malah menjarut Ketua Panitia Pemilihan Indonesia Hadikusumo, yang telah membanting tulang untuk dapat melaksanakan pemilihan umum, karena dosanya anggota yang terhormat Hadikusumo itu ialah ia mengatakan bahwa tidak ada alasan apapun djuga untuk menunda pemilihan umum pada waktu lain dari pada tanggal 29 September. Djuga Perdana Menteri Burhanuddin sendiri mengatakan bahwa ada kemungkinan diundurnya pemilihan umum karena belum siapnya segala persiapan. Djuga ditjobanya untuk mempergunakan alat-alat negara yang menjaga keamanan gar memutuskan negatif tentang pendjagaan keamanan itu sehingga pemilihan umum diundurkan. Tetapi jika saja tidak salah tangkap, maka diantara partai-partai yang mendukung Kabinet Burhanuddin Harahap ini ada satu partai yang melihat djauh dan menolak segala usaha untuk menghalangitertindakannya pemilihan umum tanggal 29 September itu, dan partai ini yang ternyata mendapat dukungan rakyat yang banyak karena politiknya yang berdasarkan ahlak tloggi ialah Nihilatut Ulama. Saja menjatakan salut saja pada pemimpin-pemimpin ahdlatut Ulama yang sebenarnya sendirinya melaksanakan pemilihan umum menurut rentjana yang sudah ditetapkan.

Siasat mendaruratakan Undang-undang tambahan anggota Panitia Pemilihan Indonesia, siasat memanggil Panitia Pemilihan Kabupaten langsung berhadapan dengan Pemerintah, satu hal yang melanggar Undang-undang Pemilihan Umum, karena Pemerintah hanya harus berhadapan dengan Panitia Pemilihan Indonesia sebagai penanggungjawab dari pada Pemilihan Umum, adalah usaha yang terang sekali bahwa sebenarnya Pemerintah Burhanuddin Harahap ini bermaksud mengundurkan pemilihan umum dengan satu dan lain akal. Bagaimana rakyat dapat menerima Pemerintah ini sebagai Pemerintah jujur dan disegani...?

Dan sekarang setelah Pemilihan Umum ini bisa terlaksanakan, maka keinginan dan getjara untuk mentiadakan hasil-hasil itu semakin hari semakin nyata pula. Disiarkanlah dengan maksud-maksud tertentu, bahwa di daerah-daerah dimana kekalahan sebagian partai-partai Pemerintah itu menjadi satu kenyataan yang pahit ditelan mereka, telah terjadi kejurangan dan dituntut supaya diadakan ulangan pemungutan suara.

Apabila Pemerintah Burhanuddin Harahap ini terus berkumuh dengan tiada batas-batas yang tertentu, rakyat khawatir bahwa tindakan-tindakan yang tidak jujur akan terus-menerus diambil



oleh orang-orang yang dinamakan jujur dan disegani ini sehingga merugikan perkembangan demokrasi dan kedaulatan rakyat Indonesia yang sudah dibujarnya dengan sangat mahal itu.

Ini baru lah ditengah. Dan saya undurkan pada Dewan Perwakilan Rakyat ini agar mengambil sesuatu sikap tegas untuk tidak membiarkan gejala ini menguasai hidup bangsa kita, yang terang-terangan sudah menjatakan pendapatnya bahwa mereka tidak sudi diperintah Pemerintah yang tidak didukungnya lagi.



SOAL EKO OMIKEU NGAN.

Saudara Ketua yang terhormat, „bahwasanya ekonomi negara dalam masa pembangunan akan selalu menghadapi tekanan-tekanan inflasi karena kita telah maklum” demikian keterangan Pemerintah pada halaman 15 mengenai soal-soal ekonomi keuangan.

Dengan kata-kata yang mengandung kebenaran, tapi yang ditafsirkan untuk kepentingannya sendiri berkata Pemerintah Burhanuddin Harahap dalam hal itu juga. Keadaan dan pembangunan-permbangunan dilipatgandakan ekonomi-keuangan dalam masa yang baru lalu sampai pada waktu Kabinet sekarang mulai bekerja dapat dikatakan telah merupakan inflasi yang sangat berbahaya”.

Tekanan inflasi memang telah melemahkan kedudukan devisa kita. Tetapi tenaga bangsa yang sedang membangun tidak dapat kita hidup dengan tidak mengalami defisit anggaran belanda. Usaha-usaha dari Kabinet-kabinet yang lalu telah menunjukkan bahwa tindakan moneter apapun juga diambil mereka masih saja tetap ada defisit itu dan masih tetap momok inflasi menguasai kehidupan ekonomi-moneter kita.

Tetapi adalah aneh sekali, bahwa Doctor Sumitro, yang dikatakan ahli keuangan P.S.I. yang lauhung itu ketika ia menjadi Menteri Keuangan didalam Kabinet Wilopo berbuat tidak lebih dari tidak kurang dari pada Menteri-menteri sebelum dia, dan gejala inflasi terus tetap hidup dan meluas.

Satu hal ia mau „berdjasa”, yaitu dimana kemungkinan yang itu itu masuk dalam kas negara, seperti ketika Jusuf Wibisono mengadakan pajak peredaran, disana dikawatirkan pemajakan yang itu dan dibikannya peraturan-peraturan baru untuk menggantikan peraturan yang sudah ada. Demikian pula di lainkannya ketika ia memulai pekerjaannya didalam Kabinet Burhanuddin Harahap ini dengan mengundangi undang-undang darurat untuk kenaikan opsesten minyak benzin yang diadakan Kabinet Ali-Airlin untuk mendapatkan beberapa ratus juta tambahan pemajakan yang buat negara.

Apakah akibat dari pada tindakan yang supra-dinamis dari Union Partai Sosialis Indonesia yang ultradinamis ini pula?

Penghasilan Pemerintah berkurang. Dialah ini harus ditempuh Kabinet Burhanuddin Harahap mendapatkan sumber-sumber keuangan baru, yang rajatanja kemudian memang dengan setjara "pectaculaire", kata anggota yang terhormat Sibingo Reksodipuro menutup Kantor Pusat Urusan Import dan menjiptakan badan baru yang bernama Biro Devisen Perdagangan.

Apabila diperhatikan sepiantas jalannya maka tampaknya Kabinet Burhanuddin Harahap ini memang mulai bekerja untuk menurunkan harga barang-barang. Tingkat pertama diambilnya ialah dengan menurunkan harga bensin.

Sumitro memang ahli dalam membikin publisitet membikin diri dan partainya Partai Sosialis Indon ia populer..... dengan jalan yang gampang dan yang mirip dengan mempropagandakan bahwa sesudah bensin turun, kita sudah delakase di dengan korga. Jaitu tentunya rajanja sosialismenja Partai Sosialis Indonesia. Djuga Burhanuddin Harahap dan Masjumi; mengharapkan mendapatkan rahmat dari pada ke..liha... an ahli keuangan Sumitro ini. Tetapi kenyataan kan angai berlainan dari teori. Mengap iudi k? Keadaan negara kita tidak iak n dapat mengatasi segala tekanan-tekanan n perekonomian dan keuangan kot na sa unatnja masih djadjahan. Undang-undang yang melindungi perusahaan dan om al a ing mudi djadjahan, dan orang-orang yang bekerja untuk negara ini sebagian terbe: r ma ih bentukan djaman pendjadjahan. Ap lagi djika ada Menteri-menteri yang dibentuk setjara blandistia d n berpendapan bahwa teori Belanda dapat sady dipakai di Indonesia, maka akan nati lah bahwa i itu emua meleset.

Maka untuk djuga menutup defisit negara, Jusuf Wibisono dalam Kabinet Sukiman mengadalkan Undang-undang padj k peredaran (omzet-bel sting) yang egera mdaat kan bar barang lagan dengan jumlah lebih 10% dan hantu inflasi diperhebat. Sumitro segera bertindak, djuga dengan nudjuan serupa sekarang, menurunkan harga bensin, dengan menghapuskan padjak peredaran uu..... akan tetapi situak dan sipe- gda ng be: r yang sudah melihat keuntungan masuk sekali dalam latinja tidak berketuk edikit-pun untuk menurunkan harga barang-barangnja. Dan mudi sumitro gita dji karena te rinja meakan- kan menghapuskan omzet-belasting itu harga barang-barang mudi di murah, tidak terakut. Rakyat malah menderita terus dan pechagan p-pedag ng besar dan ketji tetap makmur.

Tidak lain akibat kenyataan bahwa alat-alat Pemerintah tidak kua a untuk menjalankan tindakan-tindakan buat menaksakan orang-orang dagang mengikuti langkah Pemerintah. Lagi pula siasat melepaskan satu sumber-keuntungan Pemerintah diika dihapuskan dengan sendirinja akan malah rikan lain sumber, yang semua diperhitungkan oleh dua a dagang.



Siasat Sumitro ini memang kemudian diikuti dengan menempatkan barang-barang dalam daftar A, B, C, dan D, dengan bermacam-macam pajak lagi sehingga puseran kalung-kabut harga memuntjak rakyat tertindas oleh harga-harga yang semakin mahal itu. Tidak saja itu, bahkan untuk perut tetapi malah untuk otak seperti harga-harga buku pelajaranpun dibebani dengan sangat tinggi oleh Sumitro, sehingga terjadi demonstrasi waktu yang dihalangi polisi.

Das bagaimana akibat dengan penurunan harga ben minyak?

Dikatakan oleh berita bahwa kepada Menteri Dal ini efek diminai supaya kepada dinas bisnis partikelir dan lain-lain pengusaha pengangkutan dlandurkan menurut harga sewa atau harga pengangkutan.

Kabinet Burhanuddin Harahap ini akan pura-pura tidak tahu nanti bagaimana penurunan harga dari pada bis-bis dan alat pengangkutan itu tidak diturunkan. Nanti ada alasan lain yang cukup riil untuk tidak menongkikan penurunan harga itu. Apakah memang sebenarnya terjadi? Harga bensin turun.

Lebara tidak mendapat lagi penghasilan dari ben ini tadi untuk memenuhi keperluan-keperluannya.

Saya ingin bertanya bagaimana nasib dengan harga pengangkutan sekarang?

Apakah sudah turun menurut teori Sumitro-Kusimo? Das bagaimana pula dengan keuntungan maskapai minyak yang tidak bisa ditarik lagi oleh Pemerintah Burhanuddin Harahap, karena dengan penarikan Undang-undang Dirut tentang kenaikan opsenten itu mereka terancam pertahankan empat per seratus keuntungan seliter atas kerugian Pemerintah dan konsumen? Bukankah ini menunjukkan bahwa untuk kepentingan politik yang tidak bertanggung-jawab Pemerintah ini menguatkan lebih dulu modal besar?

Saudara Ketua yang terhormat, setelah soal bensin maka seperti sudah saya puji lebih dulu, Pemerintah Burhanuddin Harahap membikin badan baru, dengan nama Biro Devisen Perdagangan.

Dikorbankan nauntuk ini K.P.U.I. dan pegawai-pegawainya disamaratakan seluruh pegawai-pegawai K.P.U.I. itu cabang budjangan lain dibina mereka dengan mengatakan bahwa K.P.U.I. adalah sarang korupsi, seakan-akan mereka adalah yang korup diantara seluruh instansi Pemerintah yang banyak dan yang tidak kurang banyak pula yang korup disana. Periksalah segala bagian atau jawatan pembelian di segala Kementerian dan pertjajalah bahwa K.P.U.I. ini tidak memampoli korupsi itu. Tetapi untuk propaganda cabang Pemerintah yang berkewahawahan dan pun diturunkan oleh nasibnya didunia ini sebagai Pemerintah yang jujur dan disegani maka dikorban-



Rapat 75.

kanlah satu instansi ini dengan segala kogerengan

Sumitro mengatakan sebelum ia menjadi Menteri Keuangan, bahwa K.P.U.I. harus dihapuskan. Tjara-tjara teraksamakin dan sebagai gantinya akan didirikan BDP (Biro Devisen Perdagangan). Setelah orang-orang yang ditempatkan dalam Biro Devisen Perdagangan diketahui, baik susunan atas, maupun menengahnya, maka mengertilah orang mengapa bernilai sangat PSI ini diumumkan K.P.U.I. Setiap orang mengerti bahwa selama ada devisen-regimen ini maka tidak mungkin untuk membawa perbaikan, maupun pemberantasan sepenuhnya pada alat-alat yang mengatur perdagangan dalam dan luar negeri.

Tapi satu hal yang sudah jelas, ialah bahwa Sumitro dan Kasimo dua tokoh dari partai-partai minoritas dinegeri ini, telah menjalankan ekspertimen baru lagi untuk mengetahui sampai dimana teori-teori mereka bisa dipergunakan untuk apa yang dinamakan mereka menjauhkan lalu lintas barang dan uang" didalam negeri. Dengan tidak memperdalkan hukum hukum ekonomi bahwa merobah sesuatu sistem begitu saja akan merobatkan beberapa kekalutan yang mengakibatkan kenaikan harga barang-barang sebagai halnya dengan penurunan baru ini, maka mengertilah kita bahwa operasi finansial-ekonomis ini adalah satu propaganda baru.

Pemerintah Burhanuddin Harahap yang hendak heran dengan nasib rakyat kecil. Kita ingin sekali menlokong sesuatu pemerintah yang dapat menjelamatkan keadaan perekonomian rakyat, karena ini menjamin kehidupan yang makmur dan bahagia baginya.

Dengan mengunjai bahwa melibat kegagalannya yang dulu-dulu, dengan menempatkan barang-barang dalam : barang, B.I. B.II dan lain-lain itu dan tidak mengijinkan maksimum untuk "menjelaskan" defisit anggaran beludanya kita kembali lagi terpaksa mengatakan bahwa peraturan baru Sumitro ini adalah satu manifestasi lagi dari keinginan berkuasa dan keinginan bereksperimen dari golongan yang diwakilinya, dengan mengorbankan rakyat dan negara.

Dengan jalan ini Pemerintah Burhanuddin Harahap ini dengan jelas bertujuan mengembalikan kekuasaan modal asing dan perusahaan asing dengan mengikat dan melumpuhkan golongan ekonomis yang lemah dengan peraturan baru ini.

Saudara Ketua, yang terhormat, Dan Keterangan Pemerintah ternyata bahwa hasil belanja yang mungkin direstinansia menurut rentjannya ialah Rp. 1.6 milyar, sehingga defisit yang dibelennya lebih tinggi dari pada yang dikemukakan oleh Pemerintah Ali-Arfin dapat dikurangkannya menjadi Rp. 3 milyar.

Dan kalau kita ingat bahwa kenaikan opsentasi bensin yang ditjabutnya kembali berjumlah kira-



kira Rp 400 juta lebih maka tidaklah salah perkiraan Kabinet yang lalu bahwa defisit itu memang kira-kira 25 milyar rupiah. Tetapi adalah hak Pemerintah Burhanuddin Harahap untuk menaikkan defisit itu sebagaimana dikehendakinya seperti gambaran yang diberikannya dalam halaman 17 Keterangan Pemerintah itu. Dan kenaikan ini sekali lagi dipergunakannya untuk menundihkan akan kedudukan Pemerintah ini, padahal semua ini tidak lain dari pada manipulasi keuangan yang sifatnya lebih banyak politis (untuk memenangkan pemilihan umum) dari pada sungguh-sungguh moneter. Kegagalan realisasi adalah nyata sekarang. Tingkat Pemerintah hendak dijadikan Development Agent untuk katanja memerlukan pengusaha-pengusaha nasional. Saja bertanya perlu dengan apakah yang bisa diberikan oleh Development Agent ini jika sifatnya lebih banyak merupakan liberalisasi perdagangan dari pada proteksi perdagangan untuk kedudukan modal nasional lemah yang baru tumbuh?

Katanja untuk importir-importir nasional disediakan devisen cukup.

Tetapi, untuk dapat melakukan import maka importir-importir nasional itu sekarang harus berhadapan dengan importir besar asing yang besar modalnya. Dalam peraturan baru Pemerintah Burhanuddin Harahap ini, dikehendaki supaya setiap importir menyetor dulu harga barang-barang yang hendak diimport bersama dengan Tambahan Pembayaran Importnya. Didi dia harus beli dulu hak memadukan permintaan import sedang pelaksanaan import itu belum tentu dapat direalisasi karena banyak bukti-bukti sudah dikemukakan oleh pembicara lain bahwa tidak semudah keluarnya devisen buat importir nasional sebagai diidjakannya. Dulu dikatakan batasnya sepuluh hari tetapi sekarang banyak yang belum mendapat devisennya sesudah tiga minggu memasukkan permintaannya. Sumitro berhasil melakukan kontraksi uang importir nasional dengan jalan ini. Tetapi apa akibatnya? Matinya dan kedepitnya importir-importir nasional itu yang disuruh berjuang sekuatnya dan sesungguhnya menurut dasar "free fight".

Dan kepada importir asing diberikan pula kesempatan import luas dengan menyetor terlebih dulu lima juta rupiah sebagai tanggungan. Tetapi buat sebagian dari pada kaum importir besar asing ini penyetoran ini tidak perlu. Importir akientas yang mereka blayai dulu maka bisa terus bekerja dan mereka memberikan keuangannya.

Tetapi terhadap Pintu Kejuj Kabinet ini tidak berbuat apa-apa.

Sebab, barang-barang yang ada didalam tangan importir besar dan nasional belum ada artinya dibandingkan dengan apa yang ada ditangan ketiga Pintu Kejuj. Dan uang mereka kira-kira dapat diduga berjumlah tiga sampai empat milyar tidak bisa dikenakan politik "strangling" dan



kontraksi Pemerintah Burhanuddin Harahap ini. Rakyatlah yang menjadi korban dari pad. politik ultradunias ekanom-financier ning dalam kabinet Burhanuddin Harahap ini.

Harga barang-barang yang dulu, sebagai akibat dari pada „kegiatan psychologis“ nampak turun di beberapa sektor, terutama sektor tekstil (dijuga akibat dari pada pekida berapa banyak jumlah persediaan lapangan Persediaan Perindustrian yang diikwidat) sekatan dengan terus-menerus naik seperti sew. klu ada Kantor Pusat Urusan Impor.

Disamping itu harga bahan-b. lain hidup rakyat berupa beras sudah naik, garam di desa-desa minjak kelapo denkurkan juga.

Barang keperluan sehari-hari yang terang naik ialah lontok, bawang merah, bawang putih, minyak kelapa gula gawis garam, tepung, tempe, kentang, kedele, tahu, daging ayam, ikan hidup, ikan basah, ikan kering, sayuran-sayuran dan lain-lain untuk orang kecil. Memang mobil urun dari Rp. 300.000 sampai Rp. 250.000, tapi rakyat lebih mka lihat barang barang yang saja sebut itu turun dari 10 sen umpamanya menjadi lima sen. Rakyat mau hidup!

Saudara Kenia yang terhormat barangkali ada kegemilangan di kalangan Kabinet Burhanuddin Harahap ini dengan „materi industri-industri nasional untuk menolong industri“ sing, karena bahan-bahan keperlunya ulit didapat sekurang. Barangkali penghapa in Tambahan Pembayaran Impor buat benang-tenun ada usaha lain untuk „membantu“ lagi perlu laon nasional itu.

Barangkali juga pembukaan kredit lagi buat mayoritas-importer yang baru-baru ini diumumkan akan dapat menolong pengusaha nasional. Tapi, saja heran, apakah semua ini tidak menundukkan bahwa Kabinet Burhanuddin dengan Menteri Menteri Kelangkaan yang lihay itu tidak mengadakan ek perimen ek perimen lagi dan diatuk kembali? Ada kesalahkan kesalahannya yang dulu, sehingga menghancurkan segala dasar-dasar sehat dari perkembangan ekonomi dan keuangan Indonesia?

Mana arus barang yang dikatakan akan ada itu? Bagaimana bisa ada arus barang jika semua importir pada minggu-minggu apakah Biro Devisen Perdagangan ini bisa bekerja? Dan berapa besarnya volume devisa yang sudah diizinkan sesudah kera baru dari Kabinet Burhanuddin Harahap ini bekerja?

Saudara Kenia yang terhormat, setelah memper-
1 dari keadaan perekonomian kita yang kira-kira beberapa bulan akan berakhir karena arus barang yang dihindarkan itu tidak bisa di tang. mka bagi saya terbayanglah bahwa hgn. Professor Doctor Sumitro dari P.S.I. ini dalam ab. gai Don Klot keuangan dan ekonomi didalam di in kita. Didalam hubungan dengan ini sgi melihat bahwa Menteri Per konoman Kasimo hanya m rupikan keledainya Don Klot itu, karena tidak ada dia tidak dapat berbuat apa-apa dalam lapangan ke-



uang-perekor man yang diatur oleh Dewan Moneter yang diketuai oleh Sumitro. bahkan kedudukan mereka tidak lain dari pada seorang Menteri. Disinilah yang diperbolehkan oleh Sumitro mengurus barang-barang yang mau ekspor maupun kalau ada.

Bagaimana kita bisa pertajam akan kebijaksanaan dan bagaimana kita bisa teguh akan dwitunggal ini yang sedang berjela dengan dirinya sendiri digerogoti oleh modal nasional yang mau dipekerjanya dan dilipat oleh modal asing dengan penuh batapanokren kalau semua amburuk maka mereka menentumkan hidup matinya ekonomi negara ini.

Dan ekspor bagaimana? Harga barang ekspor utama yang turun yaitu getah Indonesia sekarang tidak mau lagi diperdagangkan oleh rakyat. Juga disini akan terdapat kekosongan, karena bagaimana rakyat mau produksi getah itu kalau harga produksinya lebih tinggi dari pada harga pendu lainnya yang bisa ekspor ialah kebun-kebun besar modal asing. Dimana disini kita ingin berdayasa lagi!

Saudara Ketua yang terhormat, Kabinet Burhanuddin Harahap ini ngat kerandjangan dengan menguber-uber orang yang korup. Saja merasa jukur bahwa Pemerintah ini berani. Tetapi penangkapanja yang sekarang ini lebih banyak merupakan pemberantasan korupsi untuk kepentingan politik saja. Pengundjung pengundjung Kedjaksanaan Agung selama ini semua hanya orang lain dari pada orang yang partai pendukung Pemerintah sekarang. Saja ingin juga melihat pemerkasaan diri mereka yang membeli kapal Tasikmalaja yang sekian lamanya ditahan dipelabuhan Hongkong dengan bendera Melayu-puluhnja sudah menjadi hitam, dan setelah perkara sekian lamanya dengan kerugian beratus-ratus ribu Hongkong Dollar ternyata bahwa kapal yang udah rosok itu bukanlah hak milik Republik Indonesia yang ketawa ialah Frank Star nuubandu Amerika dengan siapa orang-orang di Kementerian Pertahanan dijabatannya Ali Budardjo menjadi sekretaris djenderalnja mengadakan asosiasi Frank Star ini tidak pernah lupa pada ma dan dia pernah antjam membunuh saja dengansuutnja dari Bangkok dan baru-baru ini menirimkan epitjuk brielfkanrt dari Florida (U.S.A.) dengan perkumani: Tuan saya undang datang ke Miami... Undngan terbuka untuk kami setiap waktu".

Saja tidak takut dengan bunya-bunya, dan lebih-lebih tidak boaja Amerik ini maupun dengan kaki-tanganja di Indonesia yang masih tidak mau diganggu-gugat oleh Kabinet Burhanuddin Harahap ini yang anti-korupsi.

Bagaimana sikap Pemerintah Burhanuddin Harahap dengan perwira-perwira tinggi yang mempunyai rumah-rumah yang mahal endjata yang tidak bisa dipakai dengan khal-kuda lombanya yang berharga djaman dan bagaimana dengan beberapa pegawai negeri di lain Kementerian Per-ekon man yang bisa beli tanah digunung dan



dirikan bungalow bagus-bagus dengan alat-alat-nya yang bagus-bagus?

Korupsi amat an radjalela, kata Kabinet Burhanuddin Harahap, edjak tahun 1950, tetapi yang diuber-uber ialah yang dianggap korup pada dua tahun terakhir. Pemerintah menetapkan satu Undang-undang Darurat, akan tetapi karena kenyataan menunjukkan bahwa ini adalah senjata yang harus ditujukan kepada lawan politiknya, maka sulit untuk menerima keterangan Pemerintah yang mengatakan bahwa ia tidak melakukan tindakan itu pada golongan tertentu saja.

Dan apa yang dikemukakan sebagai entjer-entjer Undang-undang Anti-Korupsi adalah sangat prinsipil, sehingga apabila Pemerintah bermaksud baik madjukan saja rentjana itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Sementara ini.

Saudara Ketua, politik luar negeri Kabinet Burhanuddin Harahap ini adalah satu kemunduran yang besar dan yang menjulitkan perhubungan kita dengan bangsa Asia dan Afrika karena dalam soal Irian Barat kita menjalankan politik luar negeri yang ragu-ragu. Bagaimana tidak, Saudara Ketua Kabinet Burhanuddin Harahap mentjantumkan nama Idr Anak Agung Gde Agung sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan keluar dari premise bahwa „usaha Pemerintah-pemerintah yang dulu untuk mengembalikan Irian Barat kedalam wilayah Republik Indonesia tidak mendapat hasil yang diharapkan“, (halaman 27) sikap Pemerintah Burhanuddin Harahap seakan-akan dia akan dapat hasil yang diharapkan itu.

Pemerintah Belanda menjambut Anak Agung dengan gembira. Anak Agung sudah mulai membersihkan Kementerian Luar Negeri dengan mendjalankan satu politik kepegawaian yang luar biasa pula. Ia mengangkat Sudarsono (P.S.I.) dalam satu kedudukan yang mengatasi Sekdjen Kemlu sekarang. Ia mengadakan Biro Menteri dan ia akan „member-likan“ juga Kedutaan Besar Republik di Nederland dengan akan menempatkan Utojo Ramekan disana.

Ia mengangkat seorang bekas federalis lain, yaitu Djumhana dulu Duta di Vatikan dalam kedudukan di Kementerian Luar Negeri, padahal pegawai ini telah minta berhenti.

Dengan ini sebagai permulaan politik „baru“ Republik Indonesia didjalankan oleh Anak Agung terhadap Belanda sehingga ketjurigaan negara Asia-Afrika menyebabkan keblimbangan negara-negara ini apakah ada faedahnya menjokong Indonesia di Perserikatan Bangsa-bangsa dalam claim untuk mendapatkan Irian Barat.

Tidaklah heran kita, setelah Anak Agung menjundjungi Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri Belanda, maka djumlah suara yang menjokong Indonesia memasukkan soal Irian Barat di Perserikatan Bangsa-bangsa menjadi berkurang sekali dibandingkan dengan apa yang



diperoleh pada tahun yang lalu. Dyika ditahun lalu kita mendapat 3 surat pro, ditahun ini hanya 31 dari suara pengekong kita dan dengan keadaan seperti sekarang, tidak kan mungkin diterima dalam pemungutan suara terakhir yang meminta 2/3 jumlah suara sesuatu resolusi yang menuntut pembukaan perundingan lagi antara Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat Kita sudah kalah pada permulaan ini tidak cukup rupanya bagi Anak Agung dan Kabinet Burhanuddin Harahap ini karena sedang sedang dilakukan di Persekutuan Bangsa-bangsa ada dikabarkan bahwa akan dikirimkan ke Nederland Utjo Ramelan mengepahi satu delegasi untuk berbisjara tentang masalah-masalah yang masih ada antara Indonesia dan Belanda



Politik yang demikian ini tidak mungkin memperkuat claim kita di forum internasional, sebagai ersefikan Bangsa-bangsa itu, karena tampak kali Indonesia ragu-ragu dalam politik Luar terhadap Belanda. Tapi semua ini dapat dikembalikan kepada pribadi Menteri Luar Negeri Indonesia yang mempunyai sejarah yang rapat hubungannya dengan sejarah kolonial Belanda sebagai saja telah kemukakan dalam bagian permulaan keterangan saja ini.

Anak Agung, belum bisa melepaskan dirinya dari pada kenyataan bahwa dia dibesarkan dan dihidupkan sebagai „politikus“ untuk membela kepentingan Belanda. Kabinet Burhanuddin Harahap bertanggung-jawab akan ironi dari pada kenyataan ini.

Saudara Ketun yang terhormat, saya kembali sebentar pada pasal pertama dari program Kabinet ini mengenai kewibawaan. Dalam rangka kewibawaan ini Pemerintah Burhanuddin Harahap hendak menjitakan bahwa „sistem kolijjo serta akibat-akibahnya dalam pengungkitan dan montasi harus diganti dengan ukuran objekup dan zakeljik“ (halaman 5). Ini terhadap ma jarakat kepegawain

an Dan kemudian dikatikanja lagi bahwa perlu adanya „peninjauan kembali peraturan-peraturan dan tjara bekerdja yang dianggap tidak selaras dengan dasar pemeliharaan ketuhan dan kemadjuan Angkatan Darat chusuanja. Angkatan Perang umuma“ (halaman 5).

Marilah kita perhatikan tindakan itu orang yang diudjur dan disegani dalam Kabinet Burhanuddin Harahap ini, yaitu Menteri Penerangan Samsuddin St. Makmur. Rupanya Samsuddin St. Makmur ini mempunyai K'il serupa Caesar yang menang dalam perang dan masuk satu kota dengan mengatakan (sedikit variasi) „Saya datang, saya lihat dan sayalopoti“.

(S e o r a n g a n g g o t a : Tidak benar!)

Demikianlah, begitu dia masuk diruangan Kementerian Penerangan dia mulai mentlopoti pegawai-pegawai menengah yang digantikannya dengan orang-orangja. Serupa djuga dengan

Anda juga mengadakan apa yang dinamakan
naja atau menteri laos, poti dan sebagainya Kepala
Bagian Penerangan Di Indonesia Sutomo Djohar
Arisan dan menggantikannya dengan orang yang Jusuf
Purnomo atau Purnomo dijadikan Kepala sedang ke-
dudukannya juga ada dan demikian melimpahi
pegawai-pegawai ini juga telah bertunggal. Di
la angkat Wihab Siregar yang atas permintaan
sendiri keluar dari Di watan Propinsi dan ke-
duanya ikannya dipidih mereka-mereka ini dia itu dulu
ditjopok. Kemudian Kepala Di watan Propinsi
ditjopok. Dia keluar dari suatu hierarchie di Kem-
enterian Penerangan, dengan mengangkat
orang-orang yang (RI) dan lain untuk menduduki
kedudukan baik (matapang) dan berbagai ren-
jana pembalasan dengan dan sebagainya. Kedu-
dukan hukum dari pada pegawai-pegawai di
Kemeterian dilakukan dengan tidak ambil
pung dengan keteguhan Pemerintah yang me-
ngalahkan bahwa ukuran objektif dan zakelijk
harus dilaksanakan.

Dari Menteri yang bernama Samsuddin ini tidak
bisa diharapkan lain dari Kabinet Burhanuddin
harapannya akan ada dalam Kement-
erian kementeriannya dengan jalan yang tidak
dianalisis dan dipertanggungjawabkan itu.
Memang usaha akan untuk menjadi raja.

Saudara Keturang terhormat, untuk pemeli-
taraan kemasyarakatan dan ekonomi. Angkat
Perang perlu akan kita lakukan. Tidak
perinderaan, lebih perlu, tetapi kebijaksanaan.
Ini tidak dapat Pemerintah Burhanuddin
ini p ini.

Kita kagum akan keteguhan Pemerintah Bur-
hanuddin Harahap untuk menaikkan kewibawaannya
itu perbawannya dengan menanggapi penuntutan
terhadap perentannya dan pelaksananya peristiwa
17 Oktober Angkatan Darat.

Tidak lama kemudian maka mendengar berita
bahwa peristiwa ini akan dinanti. Suroso ter-
dapatnya akan dinanti. Ini akan dianggap
nyukup untuk Ben di dalam Mili er meneru-
kannya. Baik terhadap yang pertama itu yang tidak me-
mua kan nasake di dalam kita sebagai warg negara
kandungan mengenai Angkatan Udara itu
lebih-lebih menunjukkan bahwa Pemerintah
ini dengan satu dan lain-lain sedang memba-
wa kita akan dapat kita adikan itu yang
akan kita red ng dikembalikan.

Berbeda dengan peristiwa 17 Oktober, maka
peristiwa insubondasi dalam Angkatan Udara
itu baik diperhadapkan mempertalikan dan
disiplin malu akan paksa. Ini itu tidak mem-
punya hukum disiplin itu. Untuk apa KU
H.D.T. itu berlaku. Ini dari K.U.H.D.T. itu
menerangkan bahwa berlaku untuk anggota
A.D., A.L. dan A.L. yang melakukan perbuatan
yang dinamakan pelanggaran disiplin tentara.



Salah satu sendi guna sesuatu Angkatan Perang yang luhur adalah disiplin militer, sesuatu kata yang meskipun dewasa ini banyak terdengar rupn-rupannya belum banyak dimengerti, apalagi dalam pelaksanaannya. Pengertian disiplin militer adalah esensial sekali tidak hanya bagi kalangan militer sendiri, melainkan lebih-lebih lagi bagi kalangan pimpinan sipil dinegara kita. Sebab ditingkatkan tertinggi kekuasaan akhirnya ada ditangan sipil sehingga tindakan mereka dapat menentukan peraturan militer pula.

Tanpa pengertian yang mendalam tentang disiplin militer itu akan timbul perkosaan sendi-sendi Angkatan Perang, yang mengakibatkan perhubungan-perhubungan yang tidak semestinya dan yang akhirnya akan menelorkan suatu kompleks gejala-gejala yang kini lazim disebut "krisis kewibawaan".

Guna menormalkan ke daan kembali perlu dimengerti mengapa norma-norma sipil itu tak berlaku bagi masyarakat militer, dan mengapa masyarakat militer itu terdiri dari individu-individu yang bakunya tak sama, sedang masyarakat sipil terdiri individu-individu yang bakunya sama. Didalam negara yang paling demokratis maka asas-asas kemiliteran itu tetap dididjundjung tinggi dan dalam hal ini tak berbeda dengan negara-negara totaliter.

Sekarang saja mendengar bahwa Komodor Muda Udara Sujono diperbantukan kepada Menteri Pertahanan. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan: Kalau seseorang anggota Angkatan Udara itu dari sesuatu Komando Kesatuan Angkatan Udara melanggar disiplin, apakah dia akan diperbantukan pula pada komandan yang lebih tinggi?

Bagaimana hal Angkatan Udara ini bisa memperhalik kewibawaan Pemerintah? Dan bagaimana bisa ia menjaga keutuhan dan kemajuan Angkatan Perang kita?

Dilain angkatan juga ada hal-hal yang tidak menggembirakan dan yang tidak memungkinkem kemajuan Angkatan Perang kita.

Ketua: Saudara pembicara saya peringatkan bahwa waktu Saudara sudah hampir habis!

B.M. Dia: Memang sudah hampir habis juga!

Menurut kabar Laksamana Muda Subjanto, Kepala Staf Angkatan Laut akan berangkat ke luar negeri buat beberapa bulan lumanja. Dari keterangan yang kami peroleh perwira ini akan pergi dengan tetap pada kedudukannya akan tetap dengan tujuan belajar. Bersama dia akan ikut beberapa perwira Angkatan Laut yang lain. Didalam keadaan seperti sekarang ini kepergiannya itu tidl kami gembirakan bagi Angkatan Laut sendiri, karena Angkatan Laut berada dalam suatu keadaan yang perlu bimbingan. Organisasi Angkatan Laut belum sempurna. Kepala Staf Angkatan Laut ini sendiri pernah meminta kepada kawah-



annja supaya diadakan perubahan organisasi, akan tetapi hanya sebagian saja yang dilakukan. Kepala Staf Angkatan Laut Subijakto sudah lama benar memegang pimpinan Angkatan Laut. Keinginan dari para anggota staf dan komandan-komandan masih belum dapat direalisasi. Tidak terasa adanya disiplin militer tidak adanya rotasi - yaitu yang seharusnya ada dalam Angkatan Laut mengingat sifat Angkatan ini bisa menyebabkan timbulnya tendensi yang apatis dan tidak melahirkan ide-ide baru dalam Angkatan Laut. Persepsi politik Angkatan Laut belum sempurna karena perwira untuk urusan personalia tidak disamakan dengan kepala pejabat-pejabat lain yang serupa dengan Inggris, disebut "Second Sea Lord".

Angkatan Laut kita adalah satu bagian yang baru dan juga lemah keadaannya hingga keadaan yang tidak baik dalam lapangan perpolitik akan tidak membina, kegembiraan bekerja dan menantang dari perwira-perwira dan anak buah Angkatan ini.

Karena Kepala Staf Angkatan Laut sekarang hendak segera berangkat keluar negeri untuk waktu yang lama dan apabila Angkatan Laut kita tidak menjadi tertinggal karena dalam kedudukannya Kepala Staf Angkatan Laut kita pergi beladjar maka didalam hierarchie Angkatan Laut sekarang timbul kegelisahan.

Apakah Pemerintah dalam hal ini tidak melihat kesulitan akan timbul jika dibenarkan kepala Staf Angkatan Laut berangkat juga dengan tidak ada perubahan routine dalam Pimpinan dan Staf Angkatan Laut?

Pertanyaan ini didasarkan atas kepentingan perkembangan yang baik-baik saja bagi Angkatan Laut satu-satunya organisasi Angkatan Perang yang tidak terhitung penakut krisis kewibawaan sampai ini hari karena masih ada perwira-perwira senior yang dapat senantiasa mengatasi kewajibannya, tuntutannya kepada Angkatan dari pada keinginan pribadi, golongan atau dipengaruhi oleh aliran-aliran politik tertentu.

Saudara Ketua yang terhormat, maka melihat kesulitan-kesulitan yang dibikannya sendiri, ketidaksiapan rakyat padanya berhubungan dengan politik keuangan dan ekonomi yang salah politik luar negeri yang merugikan kepentingan Indonesia, politik personalia yang dapat membawa disintegrasi didalam masyarakat kepegawaian, dan kenyataan-kenyataan yang ditunjukkan rakyat bahwa ia tidak percaya kepada Pemerintah ini melihat jumlah sebagai besar suara rakyat menjatuhkan partai-partai yang tidak mendukung Pemerintah ini, maka permintaan Pemerintah Burhanuddin Harahap untuk diberikan kesempatan untuk pekerjaan sampai Parlemen baru terbentuk adalah berlebihan-lebihan.

Kalau permintaan ini dimajukan dengan pengertian bahwa dia telah akan diperoleh, maka ada-



lah Pemerintah Burhanuddin Harahap mempergunakan kekuasaannya yang didasarkan kepada „majoriteit suara di Dewan Perwakilan Rakyat“ yang nyata-nyata benar sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan kehendak-kehendak yang hidup dalam masyarakat. Perkataan-perkataan ini adalah perkataan Pemerintah sendiri, dan adalah bahwa Pemerintah Burhanuddin Harahap tunduk berdasarkan etika dan kesuailaan politik serta juga tuntutan pendapat umum untuk membatasi dirinya menjadi satu Pemerintah demisioner dengan mentjatat lagi kepentingan-kepentingan partai-partai besar yang bersangkutan bahwa untuk pembentukan Pemerintah yang akan datang perlu suasana yang lebih baik dari pada sekarang.

Itu bagilah sikap Pemerintah ini dengan apa yang diseburnya terhadap Pemerintah yang lalu oleh faktor-faktor moral dan keusilaan“ sehingga tidak menimbulkan kegelisahan.

Djanganlah mengambil tindakan-tindakan yang prinsipil yang sulit dikembalikan pada proporsinya kembali apabila masa kerja-sama antara partai-partai terbesar pendukung Kabinet sekarang dengan partai-partai yang besar dan kecil yang sekarang berada diluar Kabinet telah tiba.

Hendaklah Pemerintah Burhanuddin Harahap ini melepaskan diri dari pengaruh „bintang-bintang dipohon“ yang tidak bisa gemerlapan tjahajaja dan kembalilah kedataran tanah buat persilapan Perdana Menteri Nasional yang diperlukan untuk memajukan rakyat dan negara!

Terima kasih.

Ketua: Sekarang saja persilakan pembicara kedua, Saudara Soenarjo Gondokoesoemo.

R. P. Soenarjo Gondokoesoemo: Saudara Ketua yang terhormat, saya telah mendengarkan Keterangan Pemerintah yang telah diucapkan oleh Saudara Perdana Menteri dimuka rapat Dewan Perwakilan Rakyat yang baru lalu, yang mengenai program Pemerintah sebagai dasar menjalankan pekerdjaannya.

Berhubung dengan itu perkenankanlah, Saudara Ketua, saya menguraikan pendapat saya terhadap beberapa soal yang berhubungan dengan Keterangan Pemerintah termaksud.

Mengembalikan keperbawaan yang diartikan gerak atau kekuasaan yang dihormati dan yang harus ditaati itu adalah pengertian yang subjektif, atau dengan kata-kata lain kelihatan sinar tjahaja dimuka mata itu suatu gejala-gejala subjektif, jadi berhubungan dengan adanya perbawa atau kekuasaan Pemerintah itu kabur atau menghilang, oleh karenanya harus dikembalikan.

Saudara Ketua, berhubungan dengan kesubjektifan tersebut, timbulah pertanyaan saya kepada diri saya sendiri, yakni pada waktu kapankah siperbaw itu kabur? Dijelasnja, bilamakah kekuasaan yang terhormat dan yang harus ditaati itu menghilang? Apakah kekuasaan yang bermoral dan bermutu hingga itu menjusup didalam aparat-aparat



pemerintahan, hingga kepertajagan Angkatan Darat dan masjurokan bilang pula terdapat Pemerintah? Dan apakah ia itu menghilangkan karena pemimpin-pemimpin partai politik menghidangkannya, upai mereka berkuasa dalam segala perbuatannya untuk memegang pemerintahan negara?

Saudara Ketua hal kehilangan getas ini saja pantas ingat andjuran-andjuran dari Saudara Prof. Mr Dr Supomo satu dari pada ahli-ahli hukum, yang ditulis dalam Nimbak Indonesia No 13, tgl. 8 Maret 1953 tentang hal dasar-dasar Konstitusi untuk Konstituante nanti. Dan bagaimana akan dibentuknya, selain dari itu Saudara Prof. Supomo memperingatkan keadaan-keadaan yang perlu mendapat perhatian. Menurut pendapat beliau sistem kepartaian itu harus diatur didalam Undang-undang. Para ahli hukum negara didunia Barat telah mempersoalkan hal ini oleh karena tidak dapat dimungkiri, bahwa dinegara-negara demokrasi Barat dan juga di Indonesia, dijalankan roda pemerintahan negara dikuasai oleh partai-partai politik, atau lebih tepat oleh pemimpin-pemimpin partai politik, yang de jure sebagai partai executive tidak bertanggung-jawab, akan tetapi de facto menggunakan Kabinet yang resmi.

Tidak dapat dimungkiri pula, bahwa diseluruh negara-negara demokrasi dengan Indonesia tidak terkecuali, para pemimpin partai itu merupakan oligarchie seringkali bersifat "elite clique" yang menentukan sikap dan politik partainya, sedang para anggota partai sebagai massa pada hakekatnya hanya turut belaka dan dikat oleh disiplin partai, yang ditetapikan oleh pemimpin-pemimpin tersebut. Pada akhirnya adalah suatu kenjoraan juga, bahwa politik partai seringkali menjadi partai excess, dalam arti kepentingan partai diatas kepentingan negara.

Segala sesuatu yang tersebut diatas adalah suatu kenyataan sosiologi tertentu, dari anggapan baik atau tidaknya kenjoraan ini bagi kehidupan negara dan masyarakat.

Oleh sebab para pemimpin partai itu de facto adalah managers dari pemerintahan negara, zonder pertanggung-jawab formal, maka sudah selajaknya para pembentuk Konstitusi menajakan diri, apakah tidak telah tiba saatnya untuk mengatur didalam Undang-undang Dasar atau di Undang-undang prinsip-prinsip kepartaian dan pertanggung-jawab pemimpin-pemimpin partai diatur didalam sistem hukum negara.

Saudara Ketua, baidah hal ini diperhatikan betul oleh Pemerintah, karena pertikaian politik dalam Parlemen sementara ini, diidjalkan oleh pemimpin-pemimpin partai yang berhaluan beraneka-warna, yaitu merah-putih-hijau, merah berpallu-ari dan lain-lain lagi.

Mungkin ini sebagai lambang tjorak saja, tetapi dasar maksudnya tidak jelas, misalnya: akan dibawa kemanakah negara nasional kita ini? Dan akan dibentuk bagaimana? Hal ini terjawab pada



pedjuang-pedjuang nasional sendiri dalam bahasa asingnya; terserah pada pemerintah yang bertanggung jawab keadilan dan perdamaian.

Saudara Ketua, bagi partai saya tentang mengembangkan keperbawaan itu, harus ada syarat-syarat yang tegas, yaitu selain apa yang telah diuraikan oleh Saudara Perdana Menteri itu, saya nyatakan dengan pendek sebagai berikut: Supaya terdapat kewibawaan Pemerintah itu, hendaknya atau seharusnya orang-orang yang memegang kekuasaan dari pusat sampai pada daerah-daerah itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh rajin bekerja, adil, jujur dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang dialami oleh masyarakat dimana orang-orang itu dapat memberi bimbingan kepada masyarakat. Syarat-syarat yang sedemikian ini memang berat, tetapi itulah sudah seharusnya begitu. Jika satu dua syarat tidak dapat dipenuhi, karena masih belum begitu berbaja, asal kejujuran tetap ada tetapi jika kejujuran tidak ada, ditambah pula tidak bertindak adil, maka jangan diharapkan "gerung" akan terdapat.

Jika terdapat corang Menteri menjalankan korupsi dan diketahui oleh pegawainya, maka dapat ditentukan bahwa pegawainya lalu mempunyai juga kemauan berkorupsi.

Sangat menjelinkan, bahwa telah ada kejadian begitu, sehingga jalannya pemerintahan terutama pada lapangan perekonomian menjadi kacau, amat merugikan rakyat dan negara kita.

Mengingat itu, maka teranglah bahwa dalam Pemerintah berusaha mengembalikan kewibawaan (gerung), mau tidak mau harus memberantu korupsi dikalangan pemerintahan, dikalangan orang-orang yang memegang kekuasaan dan bawahannya.

Saya merasa girang, bahwa Kabinet sekarang tidak segan-segan menjalankan tindakan memberantas korupsi dan oleh karenanya saya mulakan juga Undang-undang Hukum Pidana ditambah dengan peraturan-peraturan istimewa, yang berbentuk Undang-undang Darurat, sehingga orang-orang yang menjalankan korupsi tidak mudah melepaskan diri dari penyelidikan yang berwajib.

Tetapi, Saudara Ketua sekalipun saya setuju dengan diadakannya peraturan-peraturan khusus itu, maka perlu dijaga, jangan hendaknya kemerdekaan azasi penduduk begitu mudah dilanggarnya.

Saudara Ketua, sebab namnya hingga saya blajar sek. rang ini, saya belum dapat membatja Undang-undang Darurat yang mengenai korupsi itu. Menurut pendapat saya, Undang-undang itu akan tidak saja d. p. t. memberi kesempatan untuk bertindak menghadapi orang atau penduduk, tetapi juga menghadapi badan-badan atau organisasi-organisasi ini amat perlu. Saudara Ketua oleh karena didalam pemilihan umum, untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat kami atau partai kami Parindra mengalami kejadian-kejadian yang harus mendapat perhatian Pemerintah.



Sebagaimana Saudara Ketua telah mengetahui, menurut kabar-kabar termuat dalam surat-surat kabar, partai kami Parindra dalam pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang belum lalu, mengalami kekalahan dan ternyata bahwa sebab-sebabnya kekalahan itu Parindra tidak dapat dengan segiat-giatnya menjalankan propaganda, masuk desa (negeri kampung) dan keluar desa (negeri kampung). Itulah tidak lain sebabnya, oleh karena Parindra tidak mempunyai uang, sebagai syarat untuk perjalan-an dan mengadakan massa yang deringan yang besar angkannya.

Sekarang yang menjadikan pertanjan dalam hati saya, ialah begini: misalnya para anggota P.K.I. atau P.N.I. dan lain-lain, seperti halnya dengan para anggota Parindra, pada umumnya tidak membayar iuran kepada partainya. Maka karena itulah Parindra miskin, terbatas dalam keuangannya, tidak mempunyai uang cukup untuk syarat kampanye pemilihan umum, tetapi, sebaliknya P.K.I. atau P.N.I. dan lain-lain dapat mengeluarkan bermiljun-miljun rupiah, untuk biaya kampanye pemilihan itu.

Ketua: Saudara pembicara, saya harap supaya Saudara kerbitara, khusus mengenai program Pemerintah saja. Jadi jangan terlalu intensif mengenai kepattiran.

R. P. Sunarjo Gondokusumo: Tetapi ini mengenai pemilihan umum, Saudara Ketua.

Ketua: Sekali lagi saya peringatkan supaya Saudara membatasi diri saja.

R. P. Sunarjo Gondokusumo: Saudara Ketua, barangkali pembicaraan saya tidak lebih sebatas dari pada yang lain-lain, yang merupakan masalah kepada individu.

Dari mana asalnya uang yang bermiljun-miljun itu? Mungkin juga Masjumi atau Partai Sosialis Indonesia mempunyai sedemikian uang sebanyak untuk kampanye tadi.

Maksud uraian tersebut tidak lain dari pada pandangan subjektif jika dilihat dengan kaitannya sosial-ekonomis, jika benar partai-partai yang memiliki jumlah yang milyaran itu entah mendapat dengan jalan legal yang istimewa entah dari mana saja menurut pendapat saya jumlah uang tersebut lebih baik dipergunakan untuk memperbaiki kehidupan rakyat jelata umumnya, yang oleh partai-partai itu dipandang miskin dan menderita.

Saudara Ketua itulah keadaan yang tidak boleh tidak menarik perhatian Pemerintah. Saya ingin dengan berapa sikap Pemerintah terhadap keadaan itu. Tetapi saya pertjaja, bahwa Pemerintah tidak akan segan-segan bertindak jika nanti ternyata telah terjadi hal-hal yang tidak baik pada organisasi-organisasi tersebut dan lain-lain pula.



Pemilihan umum bagi anggota Konstituante tidak lama lagi akan terjadi dan sekarang sudah dimulai dengan kampanye untuk kepentingan tersebut. Maka oleh karena itu sekarang oleh Pemerintah harus diawasi benar-benar terhadap keuangan partai-partai yang anggotanya sama tidak membayar urusan itu.

Saudara Ketua, sekarang tentang hasil sementara dari pemilihan umum untuk anggota D.P.R. yang baru lalu yang telah disiarkan oleh surat-surat kabar. Orang merasa terkejut bahwa N.U. terlibat begitu kuat keluar dari bus, malah akan mengalahkan Masjumi. Jika orang mengetahui sedjarah N.U. dan Muhammadiyah, dan sedjarah pembentukan Masjumi, maka kejadian tadi tidak mengherankan.

Sebelum perang keadaan N.U. sebagai perkumpulan Agama adalah jauh lebih besar dari Muhammadiyah perbandingan kekuatan antara N.U. dan Muhammadiyah adalah lebih kurang 10:1. Masjumi dibentuk terutama dari dua organisasi tersebut. Sesudah N.U. keluar dari Masjumi, maka yang menjadi tiang yang berarti bagi Masjumi ialah Muhammadiyah, ditambah dengan beberapa perhimpunan lain kecil-kecil. Maka jika dalam pemilihan umum sekarang ini akan ternyata bahwa Masjumi dapat sama atau lebih anggota dari pada N.U. itulah berarti Masjumi mengalami kemajuan yang lebih cepat dari N. sendiri.

Sekarang saja akan membikin ramalan, ramalan mana mendahului is maksud ketentuan-ketentuan pembubaran D.P.R. yang lama yang akan bubat pada saat pelantikan D.P.R. yang baru (Pasal 137 U.U. No 7 1953), sedang Presiden berhak pula membubarkan D.P.R. (U.U.D. pasal 84) yang berbunyi: Keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran ini memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan D.P.R. baru dalam 30 hari.

Berhubung dengan hal ini saja akan bertanya kepada Pemerintah: Dipukah Presiden membubarkan Parlemen Sementara ini sebelum pemilihan umum yang pertama-tama ini selesai?

Terbatal ramalan pembentukan Kabinet yang akan datang. Boleh dikira-kirakan yang akan mengambil peranan penting dalam pembentukan Kabinet yang akan datang ialah N.U., Masjumi, P.N.I. dan P.K.I. Mengingat situasi politik sekarang, maka besar kemungkinannya bahwa Kabinet yang akan datang akan terdiri atas sokongan N.U., Masjumi dan P.N.I. dan P.K.I. menduduki oposisi dalam Dewan Perwa dan Rakit. Kiranya bagi P.K.I. adalah lebih baik ada dalam oposisi, oleh karena selama 4 tahun sampai datang pemilihan umum yang kedua, belum tentu orang-orang dari P. N. Masjumi dan N.U. yang memegang pemerintahan dapat memperbaiki perekonomian dan keuangan negara kita. Bagi P.K.I. sebagai badan oposisi keadaan ini adalah satu bahan yang baik untuk agitasi yang dapat



menambah besarnya harapan untuk lebih kuat keluar dari hus. Ika oleh karena itu orang-orang yang akan memegang pemerintahan, dari Masjumi, N.U. dan P.N.I., harus insaf akan situasi tersebut dengan hendaknya memegang pemerintahan itu dipandang ringan. Partai-partai itu harus menjadikan orang-orangnya yang tjakap dan berpengalaman tjukup. Memperbaiki keuangan dan perekonomian yang terlihat sekarang ini adalah sulit. Dengan pula hendaknya sedang ditengah jalan lalu bertjettjak, sehingga Kabinet krisis Kalau kedjadin-kedjadian ang mengenai Kabinet terulang lagi seperti sebelum pemilihan umum, maka dapat dimaklakan bahwa P.K.I. akan menjadi bertambah kuat.

Saudara Ketua, memang patut sekali apabila Pemerintah sekarang ini memperhatikan keadaan pemerintahan daerah. Hak otonomi daerah-daerah harus segera diperluas, misalnya di Djawa, dari propinsi sehingga kota kecil, telah ada Undang-undang pembentukannya, dimana disebutkan tugas-tugas mana dari tiap-tiap Kementerian diserahkan kepada daerah-daerah otonom tersebut. Undang-undang pembentukan itu dihiik pada tahun 1950 jadi sudah 5 tahun tetapi kekuasaan yang telah diserahkan amat minim sekali. Pemerintahan umum dari Kementerian Dalam negeri sendiri sedikpun belum diserahkan, justru Kementerian Dalam Negeri harus memberi tjontoh kepada lain-lain Kementerian.

Saudara Ketua adalah Undang-undang No. 22 1948, katanya tidak bisa dijalankan, malah tidak lalu karena memang oleh ng dilugaskan tidak dijalankan, mungkin dibekukan dalam lembaran saja oleh staf Kementerian Dalam Negeri, staf mana terdiri dari orang-orang pamong pradija yang takut akan corpa-nya itu hilang, — Betulkah demikian halnya?

Saudara Ketua, Pemerintah minta diberi kesempatan bekerja, sehingga pada waktu Dewan Perwakilan Rakyat baru pada pertama kali mengadakan sidang, lalu menjerahkan mandamja. Permintaan ini seharusnya dikabulkan, oleh karena hasil pemilihan umum dengan sejara resmi baru dapat ditetapkan didalam bulan Februari atau Maret 1956, jadi tidak bisa dalam 5 a 7 hari diketahui resmi seperti halnya dinegara-negara Eropah dan dalam 1 minggu Kabinet telah dapat dibentuk. Berhubung dengan masalah lamanya waktu yang harus ditunggu itu maka adalah semestinya baik Kabinet Burhanuddin Harahap maupun Dewan Perwakilan Rakyat sendiri terus bekerja seperti biasa supaya tidak ada vacuum dari pemerintahan.

Saudara Ketua, jika Kabinet dan Dewan Perwakilan Rakyat dipandang demisioner sedjak tanggal 29 September yang lalu, maka pemerintahan menjadi lumpuh, yang tidak lain beradanya vacuum pemerintahan. Jika demisioner 2 a 3 minggu saja, tidak begitu berat, tetapi jika selama 4 a 5 bulan



sudah tentu mempunyai pengaruh yang amat merugikan bagi rakyat dan negara.

Saudara Ketua, tadi telah dijelaskan, bahwa Parindra telah mengalami kekalahan dalam pemilihan umum. Ini tidak berarti bagi kami kami Parindristen, bahwa Parindra tidak berarti didalam masyarakat, bahkan sebaliknya Parindra jika dibandingkan dengan lain-lain partai telah berbuat lebih banyak untuk masyarakat pada lapangan sosial dan ekonomi. Parindra senantiasa memberikan sedikit biaya banyak bekerja, Parindra bekerja untuk kepentingan masyarakat tidak dengan jalan lebih dulu mendapatkan kekuasaan.

Parindra kalah, tetapi boleh dibilang gevallen op het veld van eer, karena kalah ujan dan uang yang didapatkan oleh lawan dengan cara yang bagi kami Parindra menarik perhatian dan sangkaan-sangkaan.

Moga-moga Pemerintah dapat memberi penerangan dalam hal ini.

Sekian Saudara Ketua.

Ketua: Saya persilakan pembicara ketiga, Saudara Giok Tjhan.

Isa Giok Tjhan: Saudara Ketua, menurut Keterangan Pemerintah, maka usaha yang mesti dikerjakan oleh Pemerintah dapat diperinci seperti berikut :

1. Mengembalikan kewibawaan (moreel gezag) Pemerintah.
2. Melaksanakan pemilihan umum dan menegakkan pembentukan Plemen baru (tidak dijelaskan apakah pembentukan Konstituante tidak perlu juga dicegaskan).
3. Menjelaksanakan pembuatan Undang-undang otonomi daerah (jadi bukan Undang-undang pemilihan umum daerah).
4. Dilapangan ekonomi-keuangan: menghilangkan faktor-faktor inflasi.
5. Memberantas korupsi.
6. Meneruskan perjuangan memasukkan kembali Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia.
7. Memperkembangkan politik kerja-sama Asia-Afrika berdasarkan putusan Konferensi Asia-Afrika di Bandung.

Pemerintah mengatakan juga, bahwa programnya singkat, sebab sifat Kabinet sekarang ini adalah berlainan dari pada Kabinet-kabinet yang mendahuluinya, karena Kabinet ini melaksanakan pemilihan umum dan waktunya terbatas, yaitu Pemerintah akan menjerahkan mandatnya pada Kepala Negara pada saat Parlemen baru terbentuk.

Ojadi Saudara Ketua, dari keterangan ini orang dapat menarik kesimpulan bahwa Kabinet sekarang ini merasa dirinya sebagai Kabinet peralihan, Kabinet "care-taker" dengan waktu bekerja terbatas.



Didalam meneliti keterangan Pemerintah itu selanjutnya, maka orang-orang mendapat kesan bahwa telah ditampung-ndukkan dua matjam saat, yaitu:

1. saat pemungutan suara didalam pemilihan umum, yang menurut kelaziman dilip negara berdasarkan demokrasi parlementer memperngaruhi kedudukan Kabinet;
2. saat pembentukan Parlemen baru.

Soal pengertian saat ini dapat mudah diselesaikan, apabila kita berpegangin pada paham demokrasi parlementer.

Memang, di Indonesia sekarang ini belum ada ketentuan. Oleh karenanya kita perlu memperhatikan pelaksanaan sistim demokrasi parlementer dinegara-negara lain, terutama dinegeri-negeri yang mengenal lebih dari dua partai. Amerika dalam hal ini tidak dapat dipakai sebagai tjonjol, karena di Amerika Serikat berlaku sistim Kabinet presidentil.

Saudara Ketua, dari Keterangan Pemerintah itu ternyata, bahwa alasan mengembalikan mandat yang dikemukakan itu bukanlah karena Kabinet jatuh atau Kabinet hendak mengundurkan diri. Alasan yang menyebabkan penjerahan mandat itu ialah karena telah dilaksanakan pemungutan suara, yang menyebabkan perubahan susunan keanggotaan Parlemen baru. Perubahan ini lebih-lebih diakui, sebab Parlemen yang sekarang ini tidak dibentuk sebagai hasil pemilihan umum.

Perubahan susunan Parlemen baru ini segera nyata setelah diketahui sebagian besar hasil pemilihan umum. Jadi pertimbangan kekuatan dalam Parlemen baru berlainan dari pada dalam Parlemen lama. Sekalipun yang memperoleh kemenangan dalam pemilihan umum adalah partai dari formatur Kabinet lama, tetapi ditinjau setjara politik telah terjadi pergeseran pertimbangan kekuatan suara didalam Parlemen. Oleh karenanya maka pengembalian mandat tidak menunggu saat pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat baru, tetapi pada saat orang mengetahui susunan Parlemen baru.

Hal ini terjadi di Nederland, di Perancis, di Italia dan di banyak negeri lainnya yang berazaskan demokrasi parlementer.

Didalam meninjau keterangan-keterangan Mr Sartono dan Mr Tambunan pada pers didalam persinterview masing-masing telah diakui kebenarannya hal itu. Hanya Mr Tambunan mengemukakan faktor waktu, yaitu katanya diluar negeri hasil parti pemungutan suara dapat diketahui dalam tempo beberapa hari, tetapi di Indonesia hal itu tidak mungkin terjadi begitu tjepat.

Saudara Ketua, apabila diakui kebenarannya sebagai prinsip, faktor waktu mestinya tidak boleh menyebabkan kita main tawar. Rask juga disini dikemukakan, bahwa dinegeri-negeri lain krisis Kabinet dapat diselesaikan dalam tempo harian, sedang di Indonesia sering makan waktu bulanan.



Tetapi perbedaan waktu ini tentu tidak menjebabkan kita lalu berpendapat bahwa krisis Kabinet tidak boleh terjadi karena faktor waktu itu.

Pun soal kewajiban Kabinet meminta votum kepercayaan Parlemen di dalam sejarah tegak ditentukan harus terjadi dalam tempo 8 hari. Tetapi di Indonesia tiap Kabinet minta waktu bulanan untuk mengadakan keterangan buat minta votum kepercayaan. Faktor waktu ini tentu saja tidak bisa menyebabkan kita untuk menyimpang dari kelaziman demokrasi parlementer yang sehat. Votum kepercayaan tiap negeri yang berazaskan demokrasi parlementer merupakan syarat mutlak untuk dapat mulai bekerja dalam arti bekerja sebagai Kabinet dengan kekuasaan penuh. Oleh karenanya permintaan votum itu harus terjadi sekali saja.

Saudara Ketua soal yang saya kemukakan diatas ini baik sekali kita renungkan bersama dengan tenang. Terutama karena soal itu ada hubungan erat sekali dengan pelaksanaan program Kabinet pasal pertama, yaitu pengembalian kewibawaan Pemerintah.

Moreel gezag biasanya dimiliki oleh Pemerintah apabila tindakannya berdasar keadilan dan tidak bersifat sewenang-wenang. Hal ini ditjapai apabila Pemerintah memgang aturan-aturan yang menguntungkan kemajuan demokratis dari masa dan bangsa. Supaya aturan-aturan itu menjadi ketentuan maka aturan-aturan itu harus dijadikan hukum.

Pada saat sekurang ini di Indonesia kita mengenal banyak macam aturan hukum. Ada yang asal dari zaman kolonial yang nyata menghalangi kemajuan demokratis di Indonesia. Undang-undang kolonial ini sudah lama dituntut rakyat untuk dihapuskan.

Ada yang dibuat sepanjang masa sesudah proklamasi 17 Agustus, tetapi yang dipandang umum menghalangi kemajuan Indonesia. Misalnya dan terutama persetujuan-persetujuan K.M.B.

Ada pula peraturan yang bukan persetujuan internasional seperti K.T.B. itu tetapi dirasakan tidak mempunyai dasar hukum. Misalnya kartukuning atau S.T.K.I. (Surat Tanda Kewarganegaraan Indonesia) kebijaksanaan pemberian rupa-rupa idin berusaha dengan syarat "asli" dan "bukan asli" yang telah berlangsung sedari Kabinet ganti Kabinet tetapi tidak mempunyai dasar hukum (Undang-undang) dan ternyata didalam praktek menjadi sumber korupsi dan pokok pangkal istum-kontjo.

Semua macam aturan itu estinggihnya merugikan moreel gezag tiap Kabinet Republik Indonesia. Jadi orang dapat menyimpulkan bahwa soal keranginja moreel gezag Kabinet ini sudah menjadi persoalan sedari ada perjanjian K.M.B. tidak baru timbul didalam Kabinet Ali, seperti yang hendak digambarkan oleh keterangan Pemerintah.



Dalam keterangan Pemerintah sekarang ini, yang hendak mengembalikan moreel gezag orang tidak mendjumpai usaha untuk menghapuskan misalnya Undang-undang kolonial, kartu kuning, politik asih-bukam, dll, yang mendjadi sumber-sumber adanya kerugian moreel gezag.

Soal lain mengenai mengembalikan moreel gezag itu ialah moreel gezag merosot apabila penduduk merasa bahwa sesuatu instansi atau alat negara bertindak dengan melampaui batas kekuasaan yang diberikannya menurut Undang-undang Darurat dan hukum. Misalnya melakukan perbuatan dengan melanggar hak-hak demokrasi.

Tetapi didalam keterangan Pemerintah ternyata tidak dijelaskan akan adanya usaha Pemerintah untuk mengembalikan kewibawaan yang merosot, karena ada pembesar yang melampaui batas kekuasaannya.

Saudara Ketua, pokok peralasan yang kita mesti hadapi ialah bahwa Pemerintah didalam keterangannya menjatakan, bahwa moreel gezag harus dikembalikan. Dindi bukan moreel gezag yang kurang harus diperbaiki. Pemerintah, ebahannya mendjelaskan, apakah sebab Pemerintah menjatakan perlu untuk mengembalikan kewibawaan, dan bukan memperbaiki kewibawaan yang telah merosot. Diatas telah dikemukakan, bahwa mengenai sebab merosotnya kewibawaan harus ditinjau setjara lebih luas dan mendalam dari djaman sedari kita terikat oleh K.M.B. Misalnya politik mengunting uang dari Mr Sjafriuddin yang telah ia mefugikan, kajat banyak dan menguntungkan modal pendjadjah Belanda di Indonesia ternyata telah berakibat mengurangi moreel gezag Pemerintah. Lain jantoh lagi dari politik yang dapat mengurangi kewibawaan Pemerintah adalah menggunakan kekuasaan untuk mengeluarkan Undang-undang Darurat tanpa memeduhi syarat-syarat tertentu didalam Undang-undang Sementara dan tanpa memperdulikan sedjarah adanya Undang-undang Darurat itu.

Disini hubungan ini baik djuga kita perhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Sementara pasal 96 mengenai Undang-undang Darurat, jaitu

1. Untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintahan,
2. Keadaan mendesak, harus diatur segera
3. Syarat tambahan berdasarkan pasal 97, Parlemen sedang ber-resses, karena peraturan-peraturan Undang-undang Darurat itu sembahal-bahalnya harus disampaikan pada Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang berikutnya.
4. Syarat tambahan menurut kelaziman demokrasi parlementer diinjak negara yang menentukan, bahwa untuk dapat bekerja sebagai Kabinet dengan kekuasaan penuh, Kabinet itu harus sudah memperotek votum keperthajaan Dewan Perwakilan Rakyat. Djuli sebelum memperoleh votum keperthajaan, tidak mungkin



suatu Kabinet dapat menjalankan kekuasaan sebagai Kabinet yang penuh kekuasaannya berdasarkan kelariman demokrasi parlementer.

Selanjutnya menurut sedjarahja seperti diterangkan dalam memori djaud dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat atas laporan Bahagian-bahagian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat, maka pasal 96 itu, diadakan tidak untuk memberi kesempatan bagi Pemerintah melampaui garis-garis demokrasi, melainkan untuk mengatasi berbagai kesulitan pada masa permulaan ini.

Tentu saja tidak ada antara kita, yang akan mengatakan, bahwa sesudah kita merajakan merdeka 10 tahun, kita masih berada dalam masa permulaan.

Saudara Ketua mengenai keterangan Pemerintah tentang pelaksanaan pemilihan umum, saja hendak mengemukakan, bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan 4 matjatu azas, yaitu umum, sama, bebas dan rahasia.

Pelanggaran terhadap 4 matjam azas ini harus ditjatat dan dilurus setjepatnja guna diperbaiki segera.

Tentang azas umum, yang mestinja berarti pemungutan suara terdjadi serentak, ternyata sekarang, bahwa di beberapa Kabupaten tidak dapat dilakukan pemungutan suara pada tanggal 29 September yang lalu. Dikatak n, bahwa persiapan-persiapannya belum selesai. Didalam keterangan Pemerintahpun tidak dijelaskan, apakah keterangan-keterangan dari Kabupaten-kabupaten tentang sebab-sebabnja tidak sanggup melaksanakan pemungutan suara pada tanggal yang ditentukan telah dikontrol kebenarannya. Saja harap Pemerintah memberi penjelasan tentang adanya penfelicikan itu dan bagaimanakah hasilnya.

Tentang azas sama dapat saja kemukakan, bahwa dalam pelaksanaannya telah terdjadi pelanggaran-pelanggaran umpamanya:

1. Disalah satu Tempat Pemungutan Suara di Batu pemilih-pemilih warga-negara Indonesia keturunan asing hanya diberi hak memberi suara, apabila ia dapat mengundjukkan memiliki Surat Tanda Kewarganegaraan Indonesia yang tidak berdasarkan hukum serta tidak menjadi sjar t didalam Undang-undang Pemilihan Umum.
2. Di Muara Dua di beberapa Tempat Pemungutan Suara warga-negara yang dinamakan "asli" diberi prioritas untuk memilih duluan dan yang keturunan asing baru menjusul belakangan.
3. Tidak semua pemilih yang terdaftar ternyata memperoleh surat panggilan dan pemberitahuan Tempat Pemungutan Suaranya.

Azas bebas ternyata perlu didjauun lebih sempurna pelaksanaannya.



Azas tabasin djuga perlu disempurnakan, kamar-kamar tempat pemberian suara tidak memakai tirai dan jarak tempat duduk Panitia terlampau dekat, sedang surat-suara sangat lebar.

Selanjutnya, Saudara Ketua, saya hendak minta perhatian Pemerintah akan adanya berita-berita pers, yang menuturkan, bahwa kalangan negara-negara SEATO mau mengambil tindakan, yang dalam baktekatnya intervensi bersenjata terhadap Republik Indonesia, apabila hasil pemilihan umum di Indonesia dipandang merugikan kepentingan negara-negara modal monopoli dari SEATO.

Bagaimanakah sikap Pemerintah terhadap niatan untuk campur-tangan dalam urusan dalam negeri Republik Indonesia dan intervensi militer demikian ataupun intervensi berupa tekanan ekonomis-keuangan yang melingkar kedaulatan Republik Indonesia?

Saudara Ketua P merintah telah menerangkan, bahwa tugasnya ialah menjelenggarakan terbentuknya Parlemen baru, tetapi didalam keterangan itu tidak dijelaskan bagaimanakah caranya menegerakan terbentuknya Parlemen baru itu. Apakah Pemerintah hendak mengubah dalam arti memperpendek batas-batas ketentuan waktu yang terdapat didalam Undang-undang Pemilihan Umum mengenai pemberitahuan dan jawaban dari calon-calon yang terpilihnya?

Dalam hubungan usaha menegerakan terbentuknya Parlemen baru itu, saya hendak mengemukakan, bahwa sehingga dewasa ini belum diumumkan Peraturan Pemerintah yang ditentukan oleh Undang-undang Pemilihan Umum pasal 136 mengenai cara pengangkatan untuk memenuhi jaminan perwakilan golongan ketjil setara sesuai dengan keinginan golongan masing-masing.

Ukuran apakah yang hendak digunakan oleh Pemerintah untuk mengontrol keinginan golongan masing-masing perlu sekali dijelaskan oleh Pemerintah dalam jawabannya nanti, supaya jaminan perwakilan untuk golongan ketjil itu tidak menjadi lapangan permainan siasat dari partai-partai politik untuk memperoleh tambahan kursi extra, yang dapat berakibat korupsi politik akibat penjatulan arti kata jaminan perwakilan untuk golongan ketjil itu, yang dapat melampirkan sifat dan arti jaminan perwakilan untuk golongan ketjil yang sesungguhnya.

Untuk menjelaskan azas demokrasi dan arti jaminan perwakilan untuk golongan ketjil itu, sehingga pengisiannya, dapat bebas dari sistim kontjo dan bebas dari napsu permainan korupsi politik, saya hendak mempertimbangkan, supaya didalam Peraturan Pemerintah itu ditentukan, bahwa dalam tingkat pertama tiap calon untuk pengangkatan hanya dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah apabila pengajolannya itu disokong oleh 20.000 orang dari golongannya masing-masing, yaitu berwujud tanda-tangan serta keterangan tentang alamatnya. Apabila jaminan perwa-



Rapat 75.

belum dapat dipenuhi dengan tjalon-tjalon yang dikemukakan dengan sokongan 20.000 tandatangan golongan masing-masing barulah dalam tingkat selanjutnya dipertimbangkan tjalon-tjalon yang memperoleh sokongan jumlah jumlah lebih ketjil setara berturut-turut. Syarat matjam ini adalah adil dan dapat mendjuaan, bahwa orang-orang yang hendak diangkat guna mengisi jabatan perwakilan untuk golongan ketjil itu betul-betul sesuai dengan keinginan golongan masing-masing.

Supaya ada kontrol umum atas pengangkatan itu, maka nama tjalon-tjalon yang diangkat diumumkan disertai dengan keterangan tentang berapa sokongan dari golongan masing-masing.

Saudara Ketua, dalam pandangan umum babak pertama ini oleh berbagai pemihjara telah dikemukakan persoalan: Apakah batas-batas kompetensi Kabinet peralihan, yang sering disebut "caretaker cabinet"?

Pada akhir keterangannya P merintah menyatakan "sifat Kabinet sekaran ada berlainan dari Kabinet-kabinet yang terdahulu" ditambah dengan penjelasan "waktu bekerdjanya hanya untuk masa peralihan yang pendek". Tugas terutama, yang ditentukan oleh Wakil Presiden (halaman 1 keterangan Pemerintah) adalah dua matjam, yaitu: 1. mengembalikan kewibwaan dan moral getag Pemerintah; 2. melaksanakan pemilihan umum dan menegerakan pembentukan Parlemen baru.

Keterangan ini sendiri menimbulkan pertanyaan: Apakah Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar kita berhak memberikan tugas pada formatur tentang apa yang harus dikerdjakan oleh Kabinet yang hendak dibentuk? Apakah dengan adanya tugas itu kebebasan seorang formatur Kabinet dan Perdana Menteri untuk menentukan sendiri program Kabinetnya tidak menjadi berkurang?

Mengingat tugas itu, Saudara Ketua, maka sudah terdjadi pemungutan suara didalam pemilihan umum, maka terasalah, bahwa kesudahan pemilihan umum ini akan merubah susunan Parlemen yang kita kenal sekarang ini. Oleh karenanya tentu timbul pertanyaan: Sampai dimanakah kompetensi Kabinet peralihan itu?

Kabinet ini tentu menghadapi dua matjam usaha, yaitu:

1. Usaha karena desakan djaban kedjadian-kedjadian didalam dan diluar negeri.
2. Usaha yang tidak karena desakan ini, tetapi karena ambisi Kabinet sendiri.

Dari keterangan Pemerintah kita lihat, bahwa dalam golongan usaha No 2 kita lihat antara lain pentjabatan rancangan Undang-undang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (katja 13) serta usaha memulai pertjanaan pembentukan daerah otonom tingkat ke-3.



Sedang sebagai usaha golongan usaha No. 1 mestinya adalah antara lain:

- a. Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia.
- b. Soal mengakhiri perdjandjian Konperensi Medja Bundar, terutama perdjandjian Finex, yang menjebabkan kita merasakan adanya kolonialisme di lapangan ekonomi.
- c. Konperensi Asia-Afrika kedua, yang menurut berita pers disiapkan untuk diadakan di Mesir.

Mengenai usaha-usaha ini timbulah pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh Pemerintah dalam jawabannya nanti, yaitu:

Bagaimanakah status Biro Irian? Bagaimanakah sikap Pemerintah terhadap resolusi-resolusi Kongres Rukjat Seluruh Indonesia mengenai Irian Barat? Jika disetujui, tindakan-tindakan rif apakah yang hendak dijalankan oleh kort termijn oleh Pemerintah juga yang mempunyai hubungan dengan politik luar negerinya.

Dalam keterangan Pemerintah (katja 27) diterangkan: "Disamping itu Pemerintah berpendapat, bahwa segi-segi lain dari soal Irian Barat ini, yaitu hubungan Indonesia-Belanda antara lain mengenai hubungan Uni Indonesia-Belanda dan Finex, harus mendapat perhatian yang lebih besar".

Apakah artinya hubungan Uni dan Finex dalam persoalan Irian Barat ini? Apakah Pemerintah hendak membicarakan akan adanya Uni-verband dalam penyelesaian Irian Barat serta kemungkinan perdjandjian Finex, tetapi khusus terbatas kepada modal monopoli Belanda, Amerika dan lain-lainnya di Irian Barat?

Pada katja 27 itu juga Pemerintah mengatakan: "Sesuai dengan usaha mengenai Uni dan Finex diatas itu Pemerintah telah mengambil tindakan-tindakan untuk memperkuat perwakilan kita dinegeri Belanda". Apakah maksud keterangan ini? Tindakan-tindakan apakah yang dimaksudkan oleh Pemerintah dan apakah yang telah dipetjat atau diangkat baru?

Pertanyaan-pertanyaan ini dengan sendirinya memperkuat pertanyaan. Sampai dimanakah batas kompetensi Kabinet peralihan?

Dalam menindjai pertanyaan ini, tentu saja Pemerintah mestinya berpedoman, bahwa dalam menghadapi soal-soal yang tidak bisa ditunda, janganlah merubah politik luar negeri berdasarkan putusan Konperensi Asia-Afrika di Bandung.

Mengenai Konperensi Asia-Afrika yang sedang diakhiri di Mesir dan pelaksanaan putusan Konperensi Asia-Afrika itu, Saudara Ketua saja hendak minta perhatian Parlemen ini terhadap permusuhan tentang kolonialisme yang digunakan oleh Perdana Menteri dalam keterangannya. Dalam katja 29 Pemerintah menyatakan: "mengutuk kolonialisme dalam bentuk apapun juga".

Formulierung "bentuk apapun juga" dari kolonialisme ini tidak sesuai dengan putusan Kon-



persani Asia-Afrika. Menurut putusan Konperensi Asia-Afrika itu konperensi telah menjetudjui "A. In declaring that colonialism in all its manifestations is an evil which should speedily be brought to an end".

Djadi jang hendak dihapuskan adalah kolonialisme dalam „manifestaties” matjam apapun djuga, bukan dalam „bentuk” ntau „vorm” apapun djuga.

Perbedaan arti „bentuk” dengan „manifestatie” itu besar artinja, Saudara Ketua. Sebagai tjatoeh dapat dikemukakan, bahwa Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia sekarang ini dalam „bentuk” (vorm) sudah dikatakan memiliki kedaulatan penuh dan sempurna, tetapi karena akibat Finec Konperensi Medja Bundar kita merasakan akan adanya kolonialisme dilapangan ekonomi-keuangan, jang menjejahkan rakyat Indonesia menuntut pembatalan Finec itu.

Selanjutnja baik djuga kita perhatikan, bahwa negara-negara jang dikenal sebagai negara-negara blok Amerika memang selalu menggunakan formuleering „bentuk” (vorm) dan bukan „uiting” (manifestaties), karena negara-negara itu tidak mengakui adanya setengah-djadjahan sebagai manifestatie dari kolonialisme. Kalau kita perhatikan, bahwa pemimpin-pemimpin negara kita sendiri djuga dalam pidato-pidatonja sering menggunakan istilah „setengah djadjahan”, maka formuleering asli dari Konperensi Asia-Afrika itu lebih sesuai dari pada formuleering jang digunakan oleh Perdana Menteri dalam keterangannya. Saja kemukakan ini untuk memperoleh pendjelasan, apakah pemakaian formuleering itu sngadja menjimpang dari pada putusan Konperensi Asia-Afrika untuk melukiskan kedunia luar akan adanya perubahan politik luar negeri dengan maksud tertentu, ataukah hanya merupakan „slip of the pen” saja?

Saudara Ketua, mengenai politik luar negeri ternyata didalam keterangan Pemerintah tidak ditjantumkan berbagai matjam perkembangan baru jang saling menjusul, jitu antara lain:

1. Bagaimanakah konsepsi Pemerintah tentang perundingan pembatalan Finec Konperensi Medja Bundar?

2. Apakah jang diperoleh dari kedatangan goodwill missie dari Singapore dan apakah hubungannya dengan kedatangannya Lord Reading di Djakarta?

3. Putusan Kabinet baru-baru ini tentang pembuatan peraturan terhadap orang-orang pelarian dari bagian Timor jang didjadjah oleh Portugis. Soal ini apakah bukan memberi hak asyl dan karena soal ini adalah persoalan djaminan pelaksanaan hak azasi manusia, apakah pertimbangan Pemerintah untuk diatur dengan Peraturan Pemerintah saja dan tidak dengan Undang-undang. Dapatkah Pemerintah memberi keterangan, apakah jang sesungguhnya terdjadi di Timor jang didjadjah oleh Portugal itu, sehingga perlu diadakan peraturan? Mengenai Undang-undang untuk me-



ngatur hak asyl tiap orang pelarian politik. memang dapat ditunda menunggu adanya Parlemen baru dan Kabinet baru.

Saudara Ketua, karena Pemerintah sendiri mengakui akan sifat Kabinet ini yang berlainan dari Kabinet-kabinet yang terdahulu dan "untuk masa peralihan yang pendek", maka saya undang Pemerintah untuk memberi perhatian dalam jawabannya nanti tentang batas kompetensinya segera tegas menurut pandangan Pemerintah.

Saudara Ketua, menurut keterangan Pemerintah tugas pertama dari Kabinet ini, yaitu mengembalikan kewajiban Pemerintah dapat dibagi dalam dua soal yaitu:

- a. Mengenai soal bukan militer
- b. Mengenai soal militer (katja 4-5)

Mengenai soal-soal bukan militer Pemerintah pada point d. menerangkan: "Warga-negara asing akan diperlindungi menurut hukum-hukum internasional baik pribadinya maupun kepentingan nija."

Tentang hal ini Pemerintah tidak memberi penjelasan apa-apa lagi. Oleh karenanya timbulah pertanyaan: Apakah keterangan itu mengenai perkara Jungschlaeger dan titik-titik nasionalisme sumber-sumber minyak di Sumatera Utara? Kita mengetahui, bahwa jalan proses Jungschlaeger itu mengalami kritik-kritik hebat dari kalangan-kalangan tertentu di Nederland. Sedang nasionalisme sumber minyak bertentangan dengan syarat "self interest" dari Amerika Serikat. Oleh karenanya perlu da penjelasan lebih jauh dari Pemerintah.

Selanjutnya dalam hubungan tugas ini, Pemerintah menerangkan pada point c bahwa Indonesia bertanggung-jawab kan mel kukas kewajiban internasional mendjunjung tinggi perdjandjian-perdjanjian yang dibuatnya, tetapi Pemerintah berniat mengadakan perubahan-perubahan dengan memakai jalan-djalan yang lazim serta dengan senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan negara sebagai pedoman.

Pemerintah telah menerangkan, bahwa sedjumlah perdjandjian-perdjanjian dagang akan ditinjau kembali. Tetapi tidak diterangkan dalam keterangan Pemerintah perdjandjian-perdjanjian yang mana yang telah ditinjau kembali dan apakah alasannya.

Selanjutnya keterangan Pemerintah point c, diatasipun menimbulkan pertanyaan: Apakah keterangan Pemerintah itu dapat diartikan bahwa Pemerintah tidak akan mempertimbangkan pembatalan setjara unilateral perdjandjian Konferensi Medan Bundar mengenai U.N.I. Efec dan Istan Barat?

Apabila kepentingan Indonesia terdjepit, apakah menurut hukum internasional tidak diberi kemungkinan dan disahkan tindakan pembatalan unilateral dari perdjandjian-perdjanjian panjang?



Dalam hubungan ini hendak saja ditanyakan: Apakah usul konkret dari Pemerintah dalam menghadapi embargo, yang dinyatakan menghalangi export Indonesia. Keterangan Pemerintah, yang menyatakan tidak setuju dengan embargo, tidak menjamin perbaikan lanjutnya export dari Indonesia.

Bagi juga kita perhatikan bersama, bahwa embargo itu mengurangi kedaulatan Republik Indonesia dilapangan ekonomi.

Berhubung dengan soal kedaulatan dilapangan ekonomi ini, baik juga dikemukakan pemendangan epem berikut:

Sering diucapkan oleh pemimpin-pemimpin negara kita, bahwa Indonesia belum berdaulat dilapangan ekonomi dan keuangan sebab masih terikat dengan persetujuan Finec Konferensi Medja Bundar. Dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi umum istilah "setengah djadjaan".

Mengingat keadaan kita yang demikian itu, maka seharusnya politik anggaran belanja negara dan politik keuangan-ekonomi tiap Kabinet memakai sebagai pedoman: Mengurangi dan menghapuskan ikatan-ikatan pembatasan kedaulatan ekonomi-keuangan dan menjegah bertambahnya pembatasan-pembatasan itu.

Jang terany mengurangi kedaulatan ekonomi-keuangan kita sekarang ini ialah:

1. Persetujuan Finec Konferensi Medja Bundar
2. Embargo.
3. Syarat-syarat bantuan Amerika Serikat.

Seperti diketahui syarat-syarat bantuan Amerika Serikat itu ditentukan didalam Undang-undang Amerika Serikat. Syarat terpenting ialah: harus menjamin "free enterprise", jang membawa akibat, bahwa negara-negara jang menerima bantuan Amerika Serikat itu dilarang memiliki dan memperluas perusahaan-perusahaan besar milik negara. Praktek di Indonesia hingga sekarang ini, dimana selama 10 tahun ini Indonesia praktis tidak mendirikan perusahaan-perusahaan negara jang besar dan memperluas serjara besar-besaran perusahaan jang sudah dikuasai oleh negara, menimbulkan kesan, bahwa syarat "free enterprise" itu berlaku juga terhadap Indonesia ketika Indonesia menerima "bantuan" Amerika Serikat.

Didalam keterangan Pemerintah sekarang ini tidak diberi keterangan apa-apa tentang berita-berita jang tersebar luas dalam surat-surat kabar pada saat Kabinet Burhanuddin Harahap ini dibentuk, bahwa Amerika Serikat telah menjedjikan bantuan sebesar 8 djuta dollar pada Indonesia. Dapatkah Pemerintah memberi pendjelasan tentang benar-tidaknya semua berita itu dan kapan p hain Indonesia minta bantuan itu dari Amerika Serikat, karena menurut Undang-undang Amerika Serikat "bantuan" Amerika Serikat hanya diberikan apabila da permohonan?

Mengingat, bahwa „bantuan“ itu mengandung sjarat jang mengurangi kedaulatan Indonesia, maka menurut ketentuuan didalam Undang-undang Da r kita semua persetujuan jang mempengaruhi kedaulatan kita harus disahkan oleh Parlemen. Oleh karenanya, apabila betul telah diterima „bantuan“ Amerika Serikat itu, beradialah Pemerintah menyampaikan teks perjanjian serta keterangan-keterangan tentang sjarat-sjaratnya pada Parlemen dalam waktu singkat!

Saudara Ketua. Mengenai keterangan Pemerintah tentang keadaan keuangan dan perekonomian saja hendak mengemukakan pandangan seperti berikut:

Sedari djaman pendjadjahan ekonomi keuangan Indonesia didasarkan pada dan tergantung dari besarnya ekspor bahan-bahan mentah

Bahan-bahan mentah ini tidak dapat diolah sendiri di Indonesia, karena seperti umum mengetahui trust-trust modal monopoli internasional menjalankan politik jang ditudjukan untuk menghalangi timbulnja industri-industri modern dinegara-negara djadjaan dan setengah djadjaan, sebab:

1. bahan-bahan mentah untuk negara-negara pendjadjaan menjadi kurang;
2. timbul saingan dari negara-negara djadjaan dan setengah djadjaan, sehingga mempersempit pasar bagi hasil paberik-paberik negara-negara pendjadjaan.

Ringkasnja, negara-negara pendjadjaan menjalankan politik untuk menghalangi rakyat djadjaan memperoleh kemadjuan tidak terbatas dilapangan ekonomi.

Politik matjam ini terasa didalam Pineas K n-pereensi Medja Bundar, dalam embargo Amerika Serikat, dalam sjarat „free enterprise“ dari „bantuan“ Amerika erikat.

Sesuai dengan politik ini, maka penghasilan negeri-negeri djadjaan diperoleh dari hasil bea impor jang tinggi dan bea ekspor jang rendah. Keadaan sematjam ini kita rasakan terus di Indonesia, hingga dewasa ini. Pajak atau bea impor terus ditambah matjamnja dan menjadi tinggi serta berat bagi rakyat.

Harga-harga pokok dari barang-barang impor di Indonesia menjadi tinggi, karena pajak impor ada tinggi. Apabila pajak impor itu diturunkan, harga barang-barang impor itu tentu turun. Tetapi penghasilan dari pajak-pajak impor itu merupakan sumber penghasilan jang penting bagi anggaran belandja negara. Djadi oleh karenanya tidak mudah diturunkan.

Soal inilah merupakan soal penting jang selalu mesti dihadapi oleh tiap orang Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian dalam tiap-tiap Kabinet jang kita kenal di Indonesia ini. Mestinja dasar politik dari Menteri-menteri itu ditudjukan untuk menghapuskan kedudukan kita jang tergantung dari penghasilan rupa-rupa pajak impor. Antara lain dengan menguasai sendiri



umber-sumber kekayaan alam, memperbesar dan memperbaiki penghasilan perusahaan-perusahaan negara.

Tetapi pihak yang tidak menyetujui untuk menghapuskan kedudukan serba tergantung dari penghasilan rupa-rupa pajak impor itu selalu mengatakan: Dari mana harus didapat penghasilan kalau tidak dari pajak impor walaupun hal ini membikin tinggi harga-harga kebutuhan hidup di Indonesia, baik yang di-impor maupun yang dibuat sendiri di Indonesia.

Djadi, Saudara Ketua, kita lihat akan adanya dua macam paham politik ekonomi-keuangan. Lalu timbulah pertanyaan: Ekuilibriumakah sikap Kabinet Burhanuddin ini?

Dari penjelasan Pemerintah ia mendapat kesan bahwa Menteri Sumitro masih tetap memilih meneruskan paham: tiuk berat pada pajak impor walaupun ada sedikit perubahan-perubahan. Tetapi prinsipnya dipertahankan.

Saudara Ketua, dalam pernyataan pandangan umum saja ini saja telah kemukakan dua hal yang bisa nyatakan menjadi sumber korupsi dan sumber sistem-korupsi yang mestinya dihapuskan.

Soal yang pertama ialah soal Surat Tanda Kewarganegaraan Indonesia yang didalam praktek ternyata menjadi sumber korupsi yang merugikan kewibawaan Pemerintah dan menghambat usaha mempertebal rasa sama harga sebagai warga-negara.

Walaupun Pemerintah selalu mengatakan dan telah memberi keterangan, bahwa Surat Tanda Kewarganegaraan Indonesia itu tidak diwajibkan dan juga pernah dinyatakan tidak berdasarkan Undang-undang, tetapi semua ini belum cukup kar na hingga sekarang terdapat belum diusul dengan tindakan larangan meminta Surat Tanda Kewarganegaraan Indonesia sebagai bukti dan belum terjadi penjabutan instruksi-instruksi resmi dari instansi manapun juga mengenai Surat Tanda Kewarganegaraan Indonesia itu.

Soal perlu adanya keterangan bagi tiap warga-negara adalah soal lain yang mestinya dapat diselesaikan sejara bidjaksana dengan tidak mengundug diskriminasi rasial lagi, apabila Pemerintah menguatahkan adanya Burgerlike Stand untuk semua warga-negara. djadi uras Tanda Kewarganegaraan Indonesia tidak ada gunanya lagi. Adanya jabatan sipil dan tjatjah djwa yang teratur baik bagi semua warga-negara Indonesia mestinya dapat mengakibatkan penghem tenaga-kes pemilihan umum. Oleh karena itu saja mendesak Pemerintah untuk mempertajepat penghapusan Surat Tanda Kewarganegaraan Indonesia dan mempertajepat usaha mengadakan Undang-undang Burgerlike Stand bagi semua warga-negara Indonesia.

Soal kedua ialah soal diskriminasi rasial dalam memperoleh berbagai macam idjin berusaha, yang dikenal dengan nama "jarat asli" dan "hukun asli". Dalam hakekatnya apa itu "asli" itu bukan



2. Kami telah pula mengetahui susunan Kabinet sekarang. Sekali up ada keinginan untuk memperoleh susunan yang lebih sempurna tetapi susunan itulah yang dikatakan maximum yang dapat ditjapai oleh Formateur dahulu jika ia menurut tugas yang dibebankan oleh Kepala Negara keatas bahunja.

3. Umur Kabinet ini udah dibatasi. Setelah ia mengembalikan mandatnja kepada Presiden dan Kepala Negara menundjuk Formateur dari partai yang mendapat jumlah wakil terbanyak yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang baru maka Kabinet sekarang akan demissioner.

Sebelumja, tidak dapat dipertanggung-jawabkan — baik juridisch Indonesisch staatsrechtelijk maupun Indonesisch politisch. Tidak ada keberatan untuk mendemissionairka Kabinet pada saat mulai pemungutan suara, tetapi nanti sesudah diadakan pemilihan umum ke-2 untuk mendemissionairkannya.

Tidaklah hidjaksani babk n herb hja untuk mempunyai Kabinet yang demissionair selama lebih kurang 4 bulan, mungkin 5 atau 6 bulan.

4. Tuduhai bahwa Kabinet sekarang tidak meritjemink n keadaan sebenarnya dalam negara. tidak dapat dipertahank n. Juga angka-angka elementara pemungutan suara menundjuklkan, bahwa yang ditjapai oleh Masjumi + N.U. + P.S.I.I. + Katholik + P.I.I. + Parkindo + Buruh + Parindra + P.I.R. + P.R. sudah merup kan lebih d n pad angka-angka yang ditjapai oleh partai-partai yang lain bersama.

Kita hendak menundjukan satu pertanyaan teoritis: Apakah tidak mungkin bahwa susunan partai-partai pendukung Kabinet sekarang sama dengan susunan partai-partai pendukung Kabinet yang akan datang sesudah selesai pemilihan umum. Apakah sesudah dikurung dengan partai-partai yang tidak ada wakilnja dalam Dewan Perwakilan Rakyat baru? Hal itu perlu pula dipertimbangkan oleh Saudara-saudara yang selulu mengatakan bahwa Kabinet ini tidak mempunyai cukup dukungan dalam majlis ket.

5. Berbisjar, tentang orang-orang yang disegani atau tidak disegani yang a olah-olah in ngjadi edjekan diri pada ka an kax n. Memang tidak ada seorangpun yang disegani oleh seluruh rakyat, bahkan Tuhan Allah Sendiri tidak disegani oleh semua manusia. Ada yang uda peraja kepadanya, apalagi orang disegani oleh semua orang tidak mungkin. Jadi harus kita meritjapai dan mentjapai dan mentjari syarat-syarat minimum yang obyektif.

Sudah terang bahwa an gya-anggota Kabinet sekarang disegani oleh partai-partai yang menydukannja dalam Kabinet dan juga disegani oleh anggota-anggota Parlemen yang mendukung Kabinet sekarang. Kriteria lain tidak ada dan sukar didapat, tetapi mungkin itu sudah cukup. Partai kami memadjukan orang yang kami pandang djadur dan djedapi begitu pula partai-partai



lain. Ukuran kami itu tidak perlu diakui orang lain, tapi cukup kami yang mengakui dan cukup jika diakui oleh Kepala Negara, oleh Pormateur dan oleh Partai-partai yang duduk bersama dalam Kabinet dan didukung oleh suara terbanyak dalam Kabinet dalam Parlemen. Dan bahwa Partai-partai yang duduk sekarang dalam Kabinet mendapat dukungan rakyat sudah terjawab dari angka-angka sementara pemilihan umum. Bahwa komposisi dan personalia harus berubah adalah soal nanti sesudah angka-angka terakhir sudah pasti.

Opini tidak ada alasan untuk mengatakan, bahwa Kabinet sekarang tidak mempunyai hak penuh sebagai Pemerintah. Tidak hanya "public opinion", tetapi "public effect" sebagian terbesar sudah mendukung Kabinet sekarang. Umumnya sudah terbatas. Bagi kami tidak ada alasan untuk tidak memberi kesempatan bekerja kepada Kabinet, dalam umur yang pendek ini.

Sekianlah.

S Ketua: Saya persilakan pembicara kelima yaitu saudara Moes.

1. A. Moes: Saudara Ketua dalam Kabinet Ali-Arifin dulu epandjang hidupnya mendapat ketjaman-ketjaman pedas oleh pers asing atau setengah asing baik didalam maupun diluar negeri maka bahagiahlah Kabinet Burhanuddin Harahap sekarang ini, karena sedjak terbentuknya Kabinet ini disambut dengan tempik-sorak oleh pers asing tersebut.

d. Apakah sebabnya? Sebabnya tidak lain ialah karena Kabinet A.A anti-kolonial, anti-imperialis dan anti-kapitalis.

Dan mengapa Kabinet Burhanuddin Harahap ini dipuji, dianjung dan dibela oleh pers asing? Sebabnya ialah karena dalam Kabinet Burhanuddin Harahap ini duduk banyak sekali tokoh-tokoh yang dengan mudah memenuhi keinginan-keinginan negara-negara imperi li-kapitalis tersebut. Mau bukti? Lihatlah politik ekonomi liberal Sumatra, yang sangat menguntungkan kapital monopoli asing.

Dan lihat li pula kepada sikap luak politik luar negeri sekarang ini dalam menghadapi masalah-masalah kolonial terutama sikap Kabinet Burhanuddin Harahap terhadap Belanda.

Saudara Ketua, marilah kita telaah isi program Kabinet Burhanuddin Harahap serta keterangannya yang meng nai politik luar negeri. Program politik luar negeri itu sangat sumier dan mengandung hanya tiga pokok, yaitu:

1. (melanjutkan) politik bebas dan aktif menuju perdamaian dunia;
2. (melanjutkan) politik Asia-Afrika dan
3. (melanjutkan) perjuangan Irian Barat.

Kerangka n program tersebut masih bisa diterima mengingat usinnya yang sangat terbatas itu. Djuga pokok-pokok yang disebut dalam program ini kami bisa menjetudul sepenuhnya, karena e-



bagai itu sebutkan tadi pokok-pokok itu hanya-
lah sekedar hujat n dari pokok-pokok politik
luar negeri Kabinet Ali-Arifin dahulu. Dalam
program maupun di dalam keterangannya tak ada
sesuipun yang merupakan tipikal baru.

Uraian Pemerintah tentang politik bebas dan
aktif lain dapat memetodkan ini karena keteranga-
an itu tak berbeda dengan keterangan-keterangan
Pemerintah-pemerintah yang mendahuluinya. Me-
mang politik bebas dan aktif yang ditunjukkan ke-
pada kepentingan rakyat dan perdamaian dunia
sudah menjadi suatu politik nasional yang tak da-
pat diubah-ubah lagi yang menjadi persoalan
sekurang-hanya satu pelaksanaan. Dan disitulah
mulai perbandingan jalan antara Kabinet Bur-
hanuddin Harahap dan Kabinet Ali Arifin.

Kabinet Ali-Arifin telah menjalankan politik
luar negeri yang bebas dan aktif dengan kon-
sekwen dengan tiada keinginan sedikitpun untuk
tindong kebiri manapun juga tidak kebiri
dan tidak pula ketimur Perhubungan baik tetap
dipelihara dengan negara manapun juga baik
dengan negara-negara Barat maupun dengan ne-
gara Timur ataupun dengan negara-negara yang
tak terikat dengan suatu blok.

Tapi berbeda dengan Kabinet Ali-Arifin maka
dari pada tindak-tanduknya hingga saat ini tak
dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabinet Burhanud-
din Harahap ini sekurang-kurangnya telah men-
derung kepihak blok timur. Kalau tidak keberatan
sedikit diapun untuk mengadakan kerja-sama
yang ras dengan negara-negara Barat, asal di-
jangan sampai membahayakan politik bebas dan
aktif itu.

Meaning, politika Kabinet Burhanuddin Harahap
terhadap Belanda sekarang ini tampaknya deniki-
an telus-telus saja keinginan untuk mengadakan
hubungan baik dengan Belanda hendak dilaksana-
kan dengan sekuat tenaga hingga rupa-rupanya
Kabinet Burhanuddin Harahap tidak akan mem-
perdulikan ancaman-ancaman dari pada tindakan-
tindakannya ini. Sedangkan yang telah tampak aka-
bat-akibat buruk dari pada politik ini Kabinet
Burhanuddin Harahap terhadap Belanda dan
negara-negara penjajah kolonial Belanda, an-
tara lain kenyataan bahwa hasil perundingan Pe-
merintah Kabinet ini di Perikaran Bangsa-
Bangsa untuk Irian Barat jauh lebih kurang dari
pada hasil yang diraih Kabinet Ali-Arifin
dahulu ditahun ang limpa. Kenyataan masalah
Irian Barat mungkin uraian lebih jauh nanti.

Sundara Kemana yang mana saja terangkan
tadi Kabinet Burhanuddin Harahap rupa-rupanya
quote que quote hendak mengadakan hubungan
baik dengan pihak Belanda.

Mengenai hubungan dengan Belanda ini antara
Kabinet Burhanuddin Harahap dan Kabinet Ali-
Arifin ada terdapat perbedaan yang prinsipil yang
berhadapan diametral satu sama lain.

Pendirian Kabinet Ali-Arifin ialah bahwa per-
hubungan Indonesia-Belanda tak bisa akap baik



di mana wilayah Republik Indonesia Irian Barat masih dikolonisir dan diduduki oleh tidak sah oleh Belanda.

Dilain pihak Kabinet Burhanuddin Harahap berpendapat bahwa hubungan baik Indonesia-Belanda tak perlu digantungkan pada pembebasan Irian Barat. Pendapat itu pendirian Kabinet Burhanuddin Harahap ini telah diucapkan berkali-kali oleh Menteri Luar Negeri Anak Agung dalam interview-interviewnya.

Apakah ini taktik, apakah syarat saja dari Kabinet Burhanuddin Harahap? Entahlah. Pada saat ini kita tak bisa meraba apa yang ada di dada Kabinet Burhanuddin Harahap. Tapi yang terang ialah bahwa bilamana Kabinet Burhanuddin Harahap benar-benar menginginkan kembalinya Irian Barat kedalam daerah kekuasaan Republik Indonesia dan memperjuangkan etjara konseskwensi maka Kabinet Burhanuddin Harahap akan memenuhi kekecewaan. Dan usaha-usaha Menteri Luar Negeri Anak Agung mendekatkan Indonesia kepada Belanda akan menemui kegagalan belaka.

Bukankah Kabinet Ali-Arifin telah heherapi kali mengajukan tawaran-tawaran kepada Belanda untuk mengadakan penbitjaraan dengan baik-baik tentang Irian Barat.

Tapi tawaran-tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Belanda, yang dengan multi-majelis hendak mempertahankan kepentingan-kepentingan kolonialnya, yang masih ketinggalan disini.

Maka oleh karena Belanda membandel dan berkeras kepala itulah Kabinet Ali-Arifin terpaksa melepaskan pembebasan Irian Barat itu ke Persekutuan Bangsa-Bangsa.

Ditinjau dari sudut perekonomian rakyat dari negara sikap Kabinet Burhanuddin Harahap terhadap Belanda itu sangat memang menghakimi. Kita semua ini mengerti bahwa perekonomian Negara kita ini masih kolonial sifatnya. Apakah akibat-akibat dari pada ekonomi kolonial itu, apakah saja uraian lagi Kemerataan dan kesengsaraan rakyat adalah itu bukti yang nyata dari pada sepak-terjang kaum kapital-monopoli yang dibantu dan disokong oleh negara-negara imperialis-kolonial-kapitalis.

Oleh karena itu maka kesengsaraan dan kemelaratan rakyat itu hanya bisa dihapus dan kermakmuran rakyat hanya bisa diluaskan, bilamana kapital-monopoli asing itu kalau tidak bisa diremuk-redamkan, sekurang-kurangnya dimitralisir kekuatannya. Etolisasi ini mungkin lah dapat diijapai dengan mengubah sistem perekonomian sekarang ini dari ekonomi kolonial ke-ekonomi nasional. Usaha kearah itu sebaliknya bisa diijapai dengan mengkilakan pengaruh-pengaruh dan campurtangan negara-negara kapitalis-imperialis dalam urusan kenegaraan kita.

Semasa Kabinet Ali-Arifin proses ekonomi nasional ini sudah mulai berdirian lanjut, walaupun harus diakui bahwa disana-sini ada terdjadi



hal-hal yang tidak dianggap an berhasiKabinet Ali-Arifin dalam hal ini disebabkan karena Kabinet Ali-Arifin antara lain berhasil membuat pengaruh-pengaruh di negara-negara yang atas negara kita

Saudara Ketua dengan sangat meyakinkan harus mengemukakan bahwa Kabinet Burhanuddin Harahap ini telah meniadakan dengan sekilgus hasil-hasil yang telah diijapai dalam perkembangan kearah ekonomi nasional Politik ekonomi liberal dari Dr. Sumitro yang telah menentekik perusahaan-perusahaan nasional dan politik linak Anak Agung yang cenderung kepada negara-negara kolonial-imperialis terutama Belanda, telah memberikan tenaga baru kepada perusahaan-perusahaan di dalam raksa a dan yang di masa Kabinet Ali-Arifin sudah mulai kehidupan tenaga, sehingga terpaksa memperlembih tenaga-tenaganya atas rakyat Indonesia.

Politik mendekati atau "toen deersgspoliek" terhadap Belanda yang diijalankan oleh Menteri Luar Negeri Anak Agung adalah demikian rupa, sehingga tak ada suatu jaminanpun yang dapat kita lihat bahwa politik itu pada akhirnya akan menguntungkan Indonesia.

Dalam rangkaian ini sungguh sangat menjolok mata usaha Menteri Luar Negeri Anak Agung untuk "mereorganiser" perwakilan kita di Den Haag yang dimulai dengan pengisiman misi Ulujo Ranselan kesana dengan maksud untuk memperbaiki perhubungan kita dengan Belanda. Sudah barang tentu "gebutir" yang mau ini ditambah dengan gembira oleh Belanda. Tapi dari pihak Belanda hingga saat ini belum ada sedikitpun gebaar balasan, sedangkan dari pihak kita konsesi diberikan terus-menerus. Politik dijual murah, politik dijual murah ini sungguh memalukan bagi rakyat di n bangsa Indonesia.

Saudara Ketua, bagaimana caranya memperbaiki hubungan dengan Belanda itu hingga sekarang masih gelap bagi kita. Apakah dengan mengabadikan K.M.B. dengan Ulujo untuk selam-lamanja? Bagaimanakah dengan Protokol pembubaran Ulu Indonesia Belanda yang telah berhasil menjempurnakan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia?

Bagaimanakah dengan rantai-rantai dan belenggu-belenggu ekonomi-keuangan yang diijalankan oleh perdjandjian K.M.B. untuk kepentingan Belanda semata-mata? Semuanya ini tak ada dianggap sedikitpun dalam Keterangan an Pemerintah

Saudara Ketua juga hendaknya diperhatikan pula oleh Pemerintah bahwa infiltrasi-infiltrasi dan bantuan-bantuan kepada gerombolan-gerombolan yang dilakukan oleh sementara pihak Belanda, masih tetap berdaluan. Ini adalah suatu kenyataan dan bukan obrolan kosong belaka. Jika Pemerintah jujur dan mau bertanggung Pemerintah tidak akan menjangkal kebenaran pernyataan saya ini, karena laporan-laporan dari alat-alat kekuasaan





negara mengenai hal itu cukup tegas dan berbukti-bukti (gedocumenteerd).

Dalam keadaan yang demikian itu dasar apakah yang dipergunakan Kabinet Burhanuddin Harahap untuk bersikap manis dan lemah-lembut terhadap Belanda?

Kita mengetahui, bahwa ada aliran-aliran yang sangat kuat dinegeri Belanda yang terdapat baik dalam Parlemennya maupun dalam pemerintahannya, yang masih belum mau mengakui kenyataan tentang adanya Indonesia Merdeka, tapi masih mau mengembalikan Indonesia ketelapak kaki pendjadjahannya. Lagi sekali, apakah dasar dari politik lunak dan manis itu? Apakah hanya kepertjajaan saja? Kalau betul demikian maka sikap yang demikian adalah terkumpau naief. Tidak Saudara Ketua, kenyataan-kenyataan yang saya urutkan tadi meyakinkan kepada saya bahwa sikap lunak dan manis terhadap Belanda akan berakir dengan nasib Belanda harus dihadapi dengan sikap yang tegas dan konsekwen, sesuai dengan keinginan rakyat terbanyak.

Saudara Ketua, saya heran menyatakan bahwa rakyat banyak menghendaki sikap tegas terhadap Belanda karena Parlemen itu telah menerima beratus-ratus bahkan beribu-ribu pernyataan-pernyataan berupa resolusi-resolusi, dan sebagainya dari berbagai-bagai aliran, organisasi, partai-partai dan sebagainya yang menghendaki pembubaran Uin dan perdjandjian-perdjandjian K.M.B. lainnya, bilamana perlu setjara unilateral.

Rakyat telah menyatakan aliran-aliran mana dan orang-orang mana yang dipertjajanya untuk mengemudikan bahtera negara dikemudian hari. Dalam Kabinet ini hanya sebagian kecil yang mendapat dukungan dari rakyat. Sebagian besar sama sekali tak mendapat backing dari rakyat. Dan tadi sudah saya jelaskan pula sikap politik yang bagaimanakah yang dikehendaki rakyat dalam menghadapi Belanda. Maka oleh karena itu politik yang dijalankan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dan oleh Menteri Luar Negeri Anak Agung Chususna adalah bertentangan dengan kehendak rakyat.

Berhubung dengan itu maka saya minta kepada Kabinet Burhanuddin Harahap agar supaya menghentikan tindakan-tindakan politiknya yang lemah-lembut terhadap Belanda yang terang-terang tidak dikehendaki rakyat itu. Diharap hendaknya dihentikan pula segala tindakan-tindakan lain dalam politik luar negeri yang bisa membawa akibat-akibat yang jauh dan mendalam karena sebagai yang dijabatkan anggota seliraksi kami Saudara Mangunsarkoro, tindakan-tindakan sematjam itu bersifat prejudiceren terhadap Kabinet yang akan datang yang mendapat dukungan seliruhnya dari rakyat.

Saudara Ketua, mengenai Irian Barat khususnya selanjutnya dipatuhi kami kemukakan pendapat kami sebagai berikut.

Pemerintah harus mengakui sekarang, bahwa hasil usaha Menteri Luar Negeri Anak Agung di sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini nyata kurang memuaskan sekali, apabila dibandingkan dengan hasil yang ditjapai tahun yang lalu oleh Menteri Luar Negeri Sumarto. Ini notabene sesudah dilepaskan offensif politik perdamaian (verzoeningspolitiek) yang lunak itu terhadap Belanda. Sebab, tahun yang lalu Irian Barat masuk dalam agenda dengan 39 suara pro, 11 anti dan 10 abstain dalam sidang umum, sedang baru-baru ini hanya dengan 31 suara pro (jadi 8 suara kurang dari dulu), 1 anti (jadi 7 suara lebih dari dulu), 9 abstain dan 2 absen. Ini berarti suatu kemunduran yang hebat, yang perlu disingkirkan sekarang. Dengan hasil yang tipis ini sudah menjadi teka-teki, bagaimana nanti kita dapat mengadakan tuntutan kita dengan suatu resolusi dipanitia politik dan di Sidang Umum, yang serta membantu Indonesia ialah semata-mata negara-negara Asia-Afrika (hanya Turki mengeti wakan sedikit, karena dari anti berubah menjadi abstain saja), tetapi ini opta hasil dari Konferensi Asia-Afrika dibawah Kabinet Ali-Arifin! Harus kita akui bahwa sikap lunak sekarang ini dapat membimbangkan teman-teman kita sendiri, yang lama kelamaan tidak mengerti lagi, apa sesungguhnya yang kita kehendaki. Yang sangat mengesjiewakan sekarang ini ialah sikap beberapa negara Amerika Latin, seperti Cuba, Honduras, Nicaragua dan anama, yang berubah dari pro menjadi anti, sedang Chili dan Paraguay dari pro menjadi abstain sekarang. Jadi konklusinya kita politik perdamaian (verzoeningspolitiek) Pemerintah sekarang ini saja telah gagal (ondanks Konferensi Asia-Afrika). Dalam pada itu Belanda tetap menolak pembijaksanaan di muka Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi juga tetap menolak bijara dengan kita diluar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai soal kedaulatan di Irian Barat.

Perdana Menteri Belanda Drees dalam pidatonya baru-baru ini di muka Tweede Kamer telah menjinggung-menjinggung Indonesia dengan cara yang jauh dari pada lunak dengan mengemukakan antara lain „penganalisaan“ tahanan-tahanan Belanda tentang Mr Bouwman yang perwira oleh karena „terantjam diwanja“ harus melarikan diri dan sebagainya. Lebih lanjut Drees mengatakan dengan gembira dalam pidatonya itu bahwa perimbangan dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa sekarang lebih baik dari tahun yang lalu, sehingga kemungkinan-kemungkinannya ketif sekali usul mengenai Irian Barat akan diterima dengan $\frac{2}{3}$ suara dalam madyelis Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sebab itu apakah yang sebenarnya dapat diharapkan dari pada suatu pertemuan pada taraf sekarang ini antara Menteri Luar negeri Anak



Agung dengan Pemerintah Belanda mengenai soal-soal diantara kedua negara itu, yang masih belum beres? Dulu diwaktu perundingan Sunario-Luns di Den Haag (diwaktu pembijaksanaan pembubaran Uni) juga telah disebut beberapa soal yang pihak Belanda ingin bereskan, tetapi sebagian besar mengenai kepentingannya sendiri semata-mata. Menurut berita-berita dari Nederland, umpama Nieuw Rotterdamse Courant, overzeest editie 4 Oktober yang lalu tentang Irian Barat sudah terang bahwa Belanda hanya mau bujara tentang soal-soal sekunder, mungkin tentang „keamanan“ di daerah sekitar Irian Barat untuk tidak „saling menginfiltrir“, soal pemerintahan dan sebagainya, tetapi tentu tidak tentang kedaulatan di Irian Barat, yang kata Belanda, hanya dapat diputuskan dengan kehendak rakyat di Irian Barat, tetapi yang dianggapnya begitu „primitief“, sehingga praktis berarti menunda sampai kiamat, oleh karena Belanda juga memandang kita sekalian dulu dengan setjara sombong sebagai „primitief“ dan „onrijp“.

Sebab itu, aneh sekali bahwa Mr Anak Agung dalam interviewnya mengatakan masih bisa melihat „lobang“, malahan bukan satu, melainkan banyak lobang untuk menjeleskan soal Irian Barat ini.

Suatu optimisme, yang sangat berlebih-lebihan, karena bertentangan sama sekali dengan realiteit yang sungguh-sungguh pahit.

Bukan politik manis yang demikian itu, Saudara Ketua, melainkan suatu politik dan diplomasi yang teguhlah, sesuai dengan kehendak rakyat kita akan membawa Irian Barat itu lepas kembali didalam daerah kekuasaan Republik Indonesia.

Saudara Ketua, menurut utjapan-utjapan Menteri Luar Negeri Anak Agung politik manis itu akan dilandjarkan lepas dari hasil dalam soal Irian Barat di Perserikatan Bangsa-bangsa.

Pendapat yang sedemikian itu bukan lagi mengejewakan, bahkan membahayakan, karena persoalan Irian Barat itu bukan saja merupakan claim nasional kita, tapi pada saat ini merupakan pula satu „security problem“, satu masalah keamanan bagi negara kita.

Karena bukanlah suatu rahasia lagi bahwa dari Irian Barat telah banyak dilancarkan infiltrasi-infiltrasi oleh Belanda ke daerah-daerah di Indonesia. Oleh karena itu soal Irian Barat bukan soal remeh, yang diperjuangkan dengan setengah hati hanya sekadar memperlihatkan saja kepada rakyat, bahwa Pemerintah tidak tinggal diam mengenai Irian Barat ini. Makin lama Belanda bertjokol di Irian Barat, makin besar pula kekuatannya disana, makin besar pula bahayanya bagi keamanan dan ketenteraman Indonesia. Dari sebab itu saja ingin bertanya kepada Pemerintah: hendak dipakainya Irian Barat itu dan hendak dibawa kemanaakah kita ini semuanya?

Dalam hubungan ini pulalah saja ingin menjatakan keheranan saja terhadap politik Australia, yang bahkan lebih hebat dari Belanda sendiri menentang dikembalikannya Irian Barat kedalam daerah kekuasaan Republik Indonesia. Sungguh aneh sikap Australia ini. Disatu pihak ia ingin menjalankan

politik tentang-baik dengan kita, tapi dilain pihak ia menentang kita mati-matian dalam soal Irian Barat.

Australia harus menginsafi bahwa Irian Barat bukan sadja wilayah yang jauh dari Indonesia, tapi sebagaimana saja katakan tadi adalah merupakan soal keamanan bagi Indonesia. Jika menurut pendapat saja "good neighbour policy" yang ingin dilaksanakan baik oleh Australia maupun oleh Indonesia, akan selalu mendapat rintangan-rintangan, selama Australia belum mengubah sikapnya terhadap Irian Barat itu. Sungguh sajang sekali bahwa dengan tetangga kita yang terdekat itu tak bisa tertjapat suatu usaha saling mengerti yang dalam sebagai dasar persahabatan yang kekal dan abadi.

Saudara Ketua, mengenai perhubungan normal antara kita dengan Djepang, baiklah diperingatkan, betapa sukar soal ini, apabila perkara kerugian perang yang didahului oleh perdjandjian pengangkatan kapal-kapal itu, tidak dibereskan lebih dulu dengan memuaskan. Lihatlah kesukarannya yang nampak dalam perundingan antara Pilipina dan Djepang yang djuga selalu dialami oleh pihak kita. Ini disebabkan bukan sadja tawaran Djepang selalu terlalu rendah, kalau dibandingkan dengan kerugian yang kita alami, tetapi djuga karena tuntutan atau syarat Djepang supaya diadakan "economic cooperation" sukar sekali kita terima begitu sadja, mengingat pertama bahwa tuntutan sematjam itu tidak pantas untuk terus dikemukakan oleh suatu negara yang berwadjab untuk membikin baik apa yang dirusaknja, dan kedua yang tidak kurang penting pula karena "economic cooperation" itu mudah sekali merupakan "economic infiltration", "economic domination" dan akhirnya "political domination". Sebab itu kita harus berhati-hati sekali dalam menyelesaikan soal ini, sebagaimana sikap Kabinet Ali-Arifin. Oleh sebab itu maka sangat disesalkan, bahwa pendirian bank campuran Indonesia-Djepang itu rupanya toch diteruskan, usaha mana diwaktu Kabinet Ali-Arifin memang dibekukan mengingat semata-mata pada bahaya-bahaya nasional tersebut. Ini menundjukkan kekurangan kewaspadaan sekarang ini setelah kita baru 10 tahun yang lampau lepas dari pendjandjian Djepang!

Lebih tepatlah, kalau soal ini diserahkan kepada Pemerintah yang akan datang.

Saudara Ketua, hanya satu titik yang terang kita melihat dalam pelaksanaan politik luar negeri oleh Kabinet sekarang ini, yakni perlandjutan politik Kabinet Ali-Arifin dilajiangkan kerja-sama negara-negara Asia-Afrika, termasuk pelaksanaan resolusi Konferensi Asia-Afrika. Tetapi ketegasan, yang perlu djuga dalam hal ini kami masih menaruh keangsaan yang besar, melihat manoeuvre yang melas dari Pemerintah menghadapi soal Irian Barat di Perserikatan Bangsa-bangsa.

Sekianlah, terima kasih.



Rapat 75.

rs. **Ketua:** Sebagai pembicara yang terakhir saya
pe akan Saudara Koberajih.

Koberajih: Saudara Ketua, mengingat waktu
dan juga oleh karena beberapa hal telah dibi-
tijkasikan oleh pembicara-pembicara yang terda-
hulu, maka terpaksa teks pidato ia, saya tjoet
kanaan-hiri.

Saudara Ketua, dalam menghadapi keterangan
Pemerintah tentang programnya yang diucapkan
oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap,
yang sangat menarik perhatian saya, ialah:
„mengembalikan kewibawaan atau gezag morcel
Pemerintah i.e. kepertjajaan Angkatan Darat
dan masprakat kepada Pemerintahnya, dengan
mendapat dukungan yang tjukup didalam Dewan
Perwakilan Rakyat, yang didalamnya duduk
orang-orang yang jujur dan disegani”.

Tugas utama yang diberikan oleh wakil Kepala
Negara kepada Kabinetformateur, menurut
hemat saya tidak dapat dipenuhi, karena logisnja,
mengembalikan kewibawaan hanyalah dapat di-
penuhi oleh orang-orang yang dalam hatinya
jujur, murni dan sepi ing pamrih untuk mem-
nubi panggilan dan tuntutan proklamasi dan
revolusi. Lahirnja dalam memimpin atau mel-
tani perjuangan proklamasi dan revolusi yang
telah gagal ini harus dapat mewujudkan
perbuatan-perbuatan yang nyata memberantas
belenggu kolonialisme untuk mempertahankan
kemerdekaan 100% bagi nusa dan bangsanja,
sesuai dengan pendirian dan tuntutan revolusi
nasionalnja yang dijetuskan oleh Proklamasi 17
Agustus 1945.

Tidak dipenuhinja dan pokok diatas moril dan
materiil seperti yang saya utarakan tadi, pengem-
balian kewibawaan yang menjadi tugas utama itu
hanyalah akan menjadi tontolan „badut politik”
yang tidak jujur bahkan sangat menjedihkan hati
rakyat yang berjuang dan berkorban. Mungkin
sekali „tontolan” yang menjedihkan n hji itu,
bagi peminja masih merasa dirinja mendapat
pelayanan, karena sipemain itu beranggapan, bahwa
rakyat masih tetap sebodoh rakyat djadjaan Hin-
dia Belanda.

Biarpun rakyat masih 90% hina bursi, tetapi
tch rakyat telah dapat membuktikan bahwa ia
tidak buta perusaan dan pengertian. Dengan de-
mitikan bagi yang membodoh-bodohkan rakyat itu,
adalah sangat keliru. Intuitie rakyat dan masjara-
kat telah dapat membandingkan yang dyelek dan
yang baik bagi na ibaja dan bagi kepentingan
nusa dan bangsanja.

Mengembalikan kewibawaan oleh golongan
yang tidak „berperhawa” baik moril maupun ma-
teriil, adalah sama halnja dengan orang yang
mentjoa membakar rumah zonder api.

Setelah pemungutan suara, sekali lagi saya
ulang, tampak nyata bahwa pendukung Kabinet

Burhanuddin Harahap ini hanya esbatas dalam lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara ini saja yang sama sekali tidak lagi menjerminkan aliran masyarakat, dan moral demokratisnya telah kabur. Walaupun bagi Masjumi, NII, Parkindo masih cukup dukungan dari aliran yang ada dalam masyarakat, tetapi bagaimanakah kedudukan P.I.R.-Hazairin, P.S.I., Sjahrir dan Fraksi Demokrat yang sudah a-moril itu?

Sekali lagi, bagaimana gerak borol akan dapat dikembalikan oleh golongan yang sudah a-moril?

Dapatkah orang membakar zander api atau sinar yang tidak cukup panasnya?

Bilamana golongan yang telah dibuktikan oleh kenyataan dapat dikatakan menjajah perwakilan rakyat ini masih "tebal muka" untuk mempertahankan kedudukan apakah golongan itu tidak menunjukkan a-morilnya saja bahkan mempertontonkan imorilnya? Dalam hal ini ingin saja mendapat keterangan dari Perdana Menteri Burhanuddin Harahap bagaimanakah caranya dapat mengembalikan kewibawaan Pemerintah bersama-sama kolega-koleganya yang sudah mau lebih tegas lagi imoril?

Menurut pendapat saja, orang yang berperbawa itu, hanya pada orang-orang yang mempunyai keunggulan jiwa, dan oleh karena itu, mereka itu mesti harus tahu diri, dan selekas mungkin meninggalkan kursi.

Saudara Ketua, dalam hal pemberantasan korupsi pun sangat disetujui oleh partai saja. Tetapi sayang, Pemerintah Burhanuddin Harahap dalam hal ini tidak dapat melepaskan diri dari tuduhan pembalasan dendam terhadap lawan politiknya. Bilamana tidak, mestilah Pemerintah Burhanuddin Harahap harus juga bertindak terhadap heboh Tasikmalaja, beras Muang Thai dan sebagainya.

Maka saja ingin mendapat keterangan dari Pemerintah Burhanuddin Harahap, bagaimanakah pendapatnya tentang heboh pembelian kapal Tasikmalaja, beras Muang Thai dan lain-lain itu, apakah kehebohan itu bukannya perbuatan korupsi yang harus segera diberantas? Bilamana ja, sampai seberapa jauh tindakan Pemerintah dalam hal itu?

Saudara Ketua, dalam program Pemerintah yang mengenai ekonomi negara kita, tidak ditanggapi tentang susunan ekonomi yang diharapkan oleh masyarakat nasional. Dalam keterangannya, gelagatnya tampak arahnya kesusunan ekonomi yang feberalistis dan kolonialistis. Gelagat yang sedemikian itu tampak jelas dalam programnya yang termaktub dalam pasal IV yang menjandarkan ekonomi negara pada pendapatan pajak yang langsung atau tidak langsung yang lazimnya hanya dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan politik pintu terbucahnya. Menitikberatkan pada sempurnanya pemungutan pajak untuk membiayai kenegaraan adalah suatu tindakan ekonomi yang kolonialistis.

Gubernur Hindia Belanda yang mendjadjah tanah kita pembiajaan-japun djuga diandarkan kepada padiak yang dibebankan diatas pundak rakyat. Dengan lain kata yang tegas dan djelas, bagi rakyat yang telah membebaskan dirinya dari belenggu pendjadjahan Belanda masuk dalam belenggu pendjadjahan bangsa sendiri.

Bilamana kita tinjau lebih dalam program ekonomi Pemerintah sekarang ini dan mengingat hankajnya pengusaha-pengusaha Nasional yang telah gugung tikar adalah soal yang logisch soal yang mesti terjadi d. n biasa dalam susunan ekonomi liberalistis dan kolonialistis. Bentuk-bentuk ekonomi nasional untuk sumber penghidupan negara tidak tampak diusahakan oleh Pemerintah, maka terbayang oleh saja akan malangnya nasib most nasionalisasi perusahaan-perusahaan Listrik dan Gas yang hingga kini belum dapat diselesaikan.

Bagi tiap warganegara yang mengerti tanggung-djawab dan patriotik, pasti menginsjaff bahwa usaha yang utama dan urgent untuk menegakkan kemerdekaan harus dapat mengusahakan sumber penghidupan bagi negaranya. Menggantung nasib negaranya pada padiak yang dipungutnya dari negara lain, berarti menggantungkan nasib nasionalnya pada bangsa asing. Maka dalam hal ini ingin saja mendapat ketegasan dari Pemerintah:

1. Bagaimanakah pendapat Pemerintah mengenai soal nasionalisasi perusahaan Listrik dan Gas?
2. Dapatkah Pemerintah melanjutkan tugas mengenai nasionalisasi perusahaan Listrik dan Gas itu dalam tahun ini djuga?
3. Status apa yang akan diberikan oleh Pemerintah bagi perusahaan itu setelah dinasionalisir seluruhnya?
4. Berapakah jumlah uang yang telah dikeluarkan untuk menasionalisir dan berapakah jumlah menurut perkiraan Pemerintah keuntungan yang didapat dari perusahaan Listrik dan Gas yang telah dinasionalisir itu?
5. Sampai berapa jauh tenaga potensi nasional yang telah ditempatkan oleh Pemerintah dalam perusahaan-perusahaan tersebut?
6. Apakah Pemerintah akan menepati djandji-djandjinya untuk tidak merupikan huruhnya setelahnya perusahaan tersebut dinasionalisir?

Sekian, Saudara Ketua terima kasih

Ketua: Deng. n ini habislah udah pembicaraan untuk malam ini. Pemandangan umum selanjutnya akan diadakan besok hari dan yang akan berbitjara ialah lima orang anggota.

Dengan ini rapat saya tutup

Rapat ditutup pada djam 22.50.

